

**IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
DESA KALONGAN KECAMATAN UNGARAN TIMUR
KABUPATEN SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Disusun Oleh:
NUR AINI SARIFAH
1801046016

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 1 (Satu) Bandel
Perihal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Aini Sarifah

NIM : 1801046016

Semester : IX (Sembilan)

Judul Skripsi : Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur
Kabupaten Semarang

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut dan oleh karenanya mohon segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 03 September 2022

Pembimbing,



Drs. H. M. Mughofi, M. Ag

NIP. 196908301998031001

PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA KALONGAN
KECAMATAN UNGARAN TIMUR KABUPATEN SEMARANG

Di Susun Oleh:

Nur Aini Sarifah

1801046016

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 22 September 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag.
NIP. 196908301998031001

Penguji III

Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si.
NIP.197303081997031004

Sekretaris/Penguji II

Dr. Agus Riyadi S.Sos.I, M.S.I.
NIP. 198008162007101003

Penguji IV

Suprihatiningsih, S.Ag., M.S.I.
NIP. 197605102005012001

Mengotahui
Pembimbing

Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag.
NIP. 196908301998031001

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Pada tanggal, 22 September 2022



Prof. Dr. H. Alvas Supena, M.Ag.
NIP. 197204102001121003

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang, adalah hasil kerja keras saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 03 September 2022



Nur Aini Sarifah

NIM 1801046016

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kita kepada Allah SWT Karena Allah lah yang menciptakan tujuh lapis langit tanpa tiang dan bumi tanpa gantungan yang senantiasa telah menganugrahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang". Karya skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Sosial (S.Sos) bidang jurusan Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang telah mengantarkan umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah yang membawa kita dari zaman unta ke zaman Toyota dan yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin amin.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana starsa satu (S1) dalam ilmu Pengembangan Masyarakat Islam pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Pada tahapan ini banyak suka dan duka yang penulis rasakan. Demikian pula banyak ilmu, peranan berharga dan pengalaman dari berbagai pihak yang penulis terima. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia serta rahmat-Nya sehingga sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan tidak lupa mengucapkan banyak terima dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof Dr. Ilyas Supena, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

3. Bapak Dr. Agus Riyadi, M.S.I selaku ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Drs. H. M. Mudhofi, M. Ag selaku dosen pembimbing sekaligus wali dosen yang selalu sabar dan memberikan nasehat di tahun-tahun pembelajaran bagi penulis serta senantiasa memberikan motivasi dalam pengetahuan bidang sosial maupun agama, memberikan semangat membara, serta sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran guna membimbing penulis hingga selesainya menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen, pegawai administrasi, dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang telah mendidik dan banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menjalankan bangku perkuliahan di UIN Walisongo Semarang. Semoga ilmu diberikan dan didapat mendapatkan ridho Allah SWT sehingga menjadi berkah dan manfaat.
6. Bapak Yarmuji, A.Md. Selaku kepala Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang telah memberikan izin dan bantuannya dari awal penelitian hingga akhir.
7. Bapak/ Ibu Pemerintah desa dan Pengelola BUMDes KMJ Desa Kalongan yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Kalongan, memberikan data-data yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini, dan sudah membantu banyak dalam memberi informasi terkait BUMDes KMJ Desa Kalongan yang penulis butuhkan hingga skripsi ini selesai.
8. Kedua orang tua saya, Bapak Muh Nur Cholis dan ibu Siti Siamah yang tak pernah ada rasa capek-capeknya untuk mensupport, menyebut nama di setiap sujudnya, mendoakan di sepertiga malam dan memberikan semangat, memberikan nasehat-nasehat, kasih sayang yang tak henti-hentinya yang sangat begitu besar kepada penulis, dan memberikan dukungan dalam bentuk apapun tanpa adanya rasa lelah untuk selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis. Semoga kedua orang tua saya selalu dalam lindungan Allah SWT, amiin.

9. Little family dari kakak saya yang sangat saya sayangi saudara Muhammad Febri Najmul M dan Qurrotul Khabibah yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan do'a yang tiada hentinya kepada penulis. Semoga selalu diberikan keberkahan dan perlindungan kepada Allah SWT, Amiiin.
10. Terimakasih untuk sahabat-sahabat dari rempong squet yang saya sayangi saudari Ani, Lutfi, Fani, Sinta, Risa, Umi, Delia, dan Nurul, merekalah yang sudah menemani penulis dari awal di bangku perkuliahan sampai sekarang ini, terimakasih atas support dan do'a yang kalian berikan kepada penulis.
11. Terimakasih kepada Leni Lutfiah, Iyya Musyadah, Beby Dian, Eka Nur Anisa, Emma Maulida, dan Risky Aeini yang sudah menguatkan penulis hingga selesai skripsi, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran hanya untuk penulis.
12. Bestie-Bestie semua yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terimakasih telah memberikan support dari sebelum menemukan judul hingga menerima Ijazah.
13. Terimakasih kepada keluarga PAC IPNU IPPNU periode 2019-2022 dan banom-banom NU Ungaran Timur yang sudah memberikan do'a serta dukungan dari awal hingga akhir.
14. Terimakasih segenap keluarga Bani Janah dan Bani Suwardi telah memberikan motivasi, dukungan serta do'a hingga penulis dapat menyelesaikan tugas ini hingga selesai.
15. Segenap keluarga KKN RDR.77 Kelompok 59
16. Segenap keluarga besar mahasiswa Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) UIN Walisongo Semarang Tahun 2018 yang selalu memberikan keceriaan, kebersamaan, serta arti dari sebuah kekeluargaan luar biasa yang khususnya keluarga PM A 2018.
17. Serta semua pihak yang selalu bertanya kapan kamu lulus, saya berterimakasih karena telah memotivasi dan memberikan do'a dari setiap kali apa yang kalian ucapkan.

Harapan penulis semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini selalu mendapatkan balasan dari Allah SWT, sebagaimana seperti amalan yang tidak akan terputus, Amiin Amiin Amiin. Penulis banyak menyadari bahwa skripsi ini belum

sempurna karena kekurangan itu kelemahan dari diri saya sendiri dan kelebihan itu datangnya dari Allah SWT. Akan tetapi penulis harapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Amiin Amiin Amiin.

Semarang, 03 September 2022



Nur Aini Sarifah

NIM 1801046016

PERSEMBAHAN

Dengan ini segala kerendahan hati dan kasih sayang karya ini kupersembahkan kepada semuanya yang selalu mendukung, memotivasi, dan mendoakan dalam penyelesaian skripsi ini untuk:

1. Kepada Orang Tua Bapak Muh Nur Cholis dan Ibu Siamah yang nggak ada capek-capeknya memberikan cinta, kasih sayang, mendorong, memotivasi, memberikan bimbingan, tidak ada henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan kepada Putrinya di setiap langkah dalam mencari ilmu.
2. Kepada Kakak Muhamad Febri Najmul Makhafil dan Qurratul Khabibah yang ada henti-hentinya memberikan motivasi, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, dan tidak pernah ada rasa capek dalam memberikan do'a untuk selalu berjuang dalam setiap langkah yang saya kerjakan. Kepada Raisa Najma Khafidza atas bantuan dan dukungannya.
3. Kepada teman-teman, saudara, dan keluarga besar, saya berterima kasih atas bantuan dan dukungannya semoga kebaikan yang kalian berikan selalu mendapatkan hidayat dan karunia dari Allah SWT, sehingga kita semua menjadi manusia yang bermanfaat dunia dan akhirat, Amiin Amiin Amiin.

Semarang, 3 September 2022



Nur Aini Sarifah

Nim: 1801046016

MOTTO

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan Tidak Bisa di Hilangkan dengan keragu-raguan”

(Imam Syafi'i: 42, kitab Al-Fara'id Al Bahiyyah)

ABSTRAK

Nur Aini sarifah 1801046016, penelitian ini berjudul Implementasi Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

Badan Usaha Milik Desa yang dibentuk atas dasar Peraturan Desa Kalongan Nomor 02 Tahun 2013 tentang BUMDes dalam upaya membantu masyarakat dalam segi sosial dan ekonomi namun pelaksanaan program masih terdapat permasalahan yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kurangnya pengetahuan teknologi dalam pengelolaan BUMDes. Pemerintah Desa Kalongan mempunyai inovasi dalam mendirikan BUMDes KMJ Desa Kalongan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan mensejahterakan perekonomian masyarakat melalui sosialisasi agar masyarakat mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam memanfaatkan potensi dan mengelola usahanya. Rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang. 2) Bagaimana hasil implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan hasil implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten Semarang.

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui fenomena yang ada. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan menggunakan teori Van Meter dan Van Horn, melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Hasil penelitian implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat upaya pelaksanaan program yang dilakukan oleh pemerintah desa yang sudah berjalan dengan kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tujuan untuk membantu masyarakat dalam sector kebersihan dan perekonomian, sumberdaya yang didapatkan dengan membantu pelaksanaan program, agen pelaksana mendapat pendampingan dari lembaga dan instransi terkait tetapi interaksi kepada masyarakat masih kurang, komunikasi antar organisasi sudah terstruktur, kecenderungan sebagai agen pelaksana sudah bisa menerima dengan aganya program, sudah adanya dukungan dari lingkungan, sosial, dan politik. Pelaksanaan program dalam pemberdayaan masyarakat memberikan efek yang signifikan yaitu membantu aspek ekonomi dengan memandirikan dan diberdayakan masyarakat dengan adanya BUMDes dan dibukanya lapangan pekerjaan, segi sosial menjadikan lingkungan Desa Kalongan menjadi bersih, memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
NOTA PEMBIMBING	II
PENGESAHAN	III
PERNYATAAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	V
PERSEMBAHAN.....	IX
MOTTO	X
ABSTRAK	XI
DAFTAR ISI.....	XII
DAFTAR TABEL.....	XV
DAFTAR GAMBAR.....	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sumber dan Jenis Data.....	9
3. Definisi Konseptual	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Uji Validitas Data	11
6. Teknik Analisis Data	12
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. Implementasi	14
1. Pengertian Implementasi.....	14
2. Model Pendekatan Implementasi.....	15
B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	18
1. Pengertian BUMDes	18

2. Tujuan BUMDes	19
3. Landasan Hukum BUMDes	20
4. Prinsip Pengelolaan BUMDes	21
C. Pemberdayaan Masyarakat	22
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	22
2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat	25
3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	26
4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	27
5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	28
6. Indikator Pemberdayaan masyarakat	28
7. Metode Pemberdayaan Masyarakat	29
BAB III GAMBARAN UMUM.....	33
A. Gambaran Umum Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang	33
1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah	33
2. Keadaan Demografi Desa Kalongan.....	35
3. Keadaan Penduduk berdasarkan Usia.....	36
4. Kondisi Keagamaan	37
5. Kondisi Ekonomi	38
6. Kondisi Pendidikan Desa Kalongan.	39
B. Gambaran Umum BUMDes KMJ Desa Kalongan.....	41
1. Profil Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya.....	41
2. Visi dan Misi BUMDes Kalongan Mandiri Jaya.....	42
3. Sejarah BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan.Kecamatan Ungaran Timur.....	43
4. Program Unit Usaha BUMDes KMJ Desa Kalongan.....	46
C. Implementasi Program BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan.....	49
1. Ukuran dan Tujuan	50
2. Sumber Daya.....	52
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana...	55

4. Karakteristik agen Pelaksana	57
5. Sikap/ Kecenderungan para Pelaksana	61
6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik.....	62
D. Hasil Implementasi Program BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan	65
1. Perekonomian	65
2. Segi Sosial.....	68
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	71
A. Analisis Implementasi Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur	71
B. Analisis Hasil Implementasi Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur	79
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN.....	90
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Luas Wilayah Desa Kalongan	33
Table 3. 2 Struktur Organisasi Desa Kalongan.....	34
Table 3. 3 Jumlah Penduduk Desa Kalongan	35
Table 3. 4 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia.....	36
Table 3. 5 Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	37
Table 3. 6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	38
Table 3. 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan	39
Table 3. 8 Struktur Organisasi BUMDes KMJ Desa Kalongan.....	42
Table 3. 9 Rekapitulasi Dana Desa Kalongan.....	51
Table 3. 10 Sumber Dana BUMDes KMJ Desa Kalongan.....	55
Table 3. 11 Rekapitulasi Keuangan Unit Persampahan	59
Table 3. 12 Anggota Unit Usaha Persampahan	63
Table 3. 13 Rekapitulasi Keuangan Unit Pariwisata.....	66
Table 3. 14 Daftar Pekerja BUMDes KMJ Desa Kalongan	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Kalongan	34
Gambar 3. 2 Sarana Bribadah	37
Gambar 3. 3 Sarana Pendidikan Desa Kalongan	40
Gambar 3. 4 Unit Usaha Periwisata	47
Gambar 3. 5 Unit usaha persampahan	48
Gambar 3. 6 Dinas Lingkungan Hidup	57
Gambar 3. 7 Permasalahan Unit Usaha Persampahan	58
Gambar 3. 8 Pembuangan Sampah Di TPA.....	59
Gambar 3. 9 Pilah Sampah.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sosial berupa kemiskinan menjadi sebagian permasalahan yang berakibat buruk kepada kehidupan masyarakat lainnya, seperti pengangguran, kelaparan, dan kebodohan (Fakih, 2020:18-19). Permasalahan kemiskinan dengan berbagai kondisi dan implikasi menjadikan salah satu bentuk permasalahan sosial yang menandakan bahwa kondisi sosial masih masuk kategori renda (Soetomo, 2008: 308). Masyarakat mempunyai pengetahuan umum dalam mendeskripsikan dan menentukan peran penting yang berada di lingkungan. Hal ini dikarenakan masyarakat setiap harinya hidup di lingkungan jadi lebih mengetahui segala hal yang dibutuhkan dalam menjalankan kehidupan (Hamid, 2020: 233). Pengentasan kemiskinan tidak hanya dapat dilakukan secara berkelompok karena usaha ini harus terpaud dengan program-program pengentasan kemiskinan (Usman, 1998: 26). Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat (Sumodiningrat, 1997: 6).

Kegiatan program yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang di ajarkan untuk menjadi masyarakat aktif, mandiri, dan kreatif dengan tujuan membangun dan meningkatkan kemampuan masyarakat agar menjadi lebih baik dan sejahtera sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan (Gunawan, 2016: 41). Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan sesuai potensi yang dimiliki sehingga pemerintah desa dapat bertindak sebagai fasilitator dengan mendukung program pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri juga dapat menjadi subyek dari adanya pemberdayaan masyarakat. Tahapan implementasi dalam pemberdayaan masyarakat menjadikan sebuah hal penting guna mengetahui keberhasilan sebuah program, sehingga dalam pelaksanaan perlu adanya pengawasan dan evaluasi

agar sesuai rencana sebuah sasaran yang sudah ditetapkan (Aryanto, dkk, 2018: 327).

Perubahan masyarakat juga dapat dilakukan dengan cara dakwah, karena dakwah memiliki misi khusus yang sama walaupun pada tipe masyarakat yang berbeda-beda (Fakih, 2020: 3). Dakwah dilakukan sebagai upaya menciptakan kondisi yang kondusif agar terjadinya sebuah perubahan dari segi pikiran, keyakinan, sifat, dan perilaku yang lebih efektif (Abduallah, 2019: 24). Pelaksanaan dakwah dalam proses pemberdayaan masyarakat menggunakan dakwah bil-hal (dakwah tindakan) dengan cara memotivasi, membangun, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam Firman Allah SWT yang termuat dalam Al-Qur'an:

أَبْلَغُكُمْ رَسُولَ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui...” (Q.S Al- A’raf [7]: 62.

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa Nabi Nuh a.s memberikan tugasnya sebagaimana utusan Allah SWT dengan berkata “Aku tak kenal lelah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, yakni perintah dan laranganNya, memberi nasihat dan tuntunan kepadamu untuk kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat dan aku mengetahui persoalan agama dan hal-hal yang ghaib melalui wahyu dari Allah apa yang tidak bias kamu ketahui”. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Nuh a.s kepada kaumnya bahwa ia mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan perintah-perintah tuhanNya agar manusia dapat beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa (*Dakwah, Hikmah, Kisah Seputar Islam, Muslim, Dan Al-Qur'an - SINDOnews*, n.d) diakses 21 Februari 2022.

Badan usaha milik desa (BUMDes) dikelola dan didirikan untuk membantu produktif dalam segi perekonomian, selanjutnya dapat dikatakan sebagai tempat pemenuhan kebutuhan karena dengan adanya BUMDes

harapannya dapat membantu masyarakat. Lembaga BUMDes juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menentukan harga yang berlaku standar dari pasar (Suryadi et al., 2021: 35). Pengembangan BUMDes menjadikan sebuah penggerak ekonomi desa dan masyarakat, karena BUMDes dapat dikatakan sebagai poros kehidupan masyarakat. Kebutuhan dan potensi yang dibutuhkan oleh masyarakat berbentuk kebutuhan pokok dapat berupa sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam potensi desa dan unit usaha yang dapat membantu perekonomian masyarakat (Sari, dkk, 2020: 55).

Desa Kalongan menjadi salah satu desa yang berada di Kecamatan Ungaran Timur yang mengembangkan potensi sebagai desa sadar wisata dan mandiri. Aktivitas penduduk Desa Kalongan dengan didukung ketersediaan lahan pertanian yang cukup luas. Dengan hal tersebut pemerintah desa mempunyai inovatif tinggi dalam pemanfaatan sumber data untuk membantu masyarakat, hal ini mengingat dengan pemanfaatan sumber daya alam ini sebelumnya dapat dikatakan belum berhasil. Dalam pemanfaatan potensi Desa Kalongan ini dibentuknya BUMDes yang aktif dengan Nama Kalongan Mandiri Jaya pada tahun 2017. (Wawancara dengan Ibu Rahmawati, Selaku Direktur BUMDes KMJ Pada tanggal 20/ 08/2021).

Regulasi yang mendasari berdirinya dan pengelolaan BUMDes yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggi dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya ditindaklanjuti dengan ranah kabupaten yaitu peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2012 tentang peningkatan pendapatan masyarakat dan desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan potensi desa. Menurut Peraturan Desa kalongan Nomor 02 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya mempunyai hak dalam menjalankanya dengan menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki desa (Peraturan Desa Kalongan, 2018: 8). Menjalankan program

Badan Usaha Milik Desa bahwa bagian dari pemanfaatan potensi lokal yang dimanfaatkan secara baik untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Pengelolaan program BUMDes KMJ serangkaian usaha dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai tujuan sebagai wadah usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat. Melainkan dalam pengelolaan program BUMDes ada juga permasalahan yang dihadapi dari unit BUMDes KMJ Desa Kalongan, yaitu: pada unit usaha sembako terlalu banyak pesaing dan masyarakat petani belum banyak yang bergabung dalam unit usaha sembako dalam menjual hasil panennya berupa padi, selanjutnya dalam unit sampah belum bisa melakukan pengelolaan sampah an-organic & organic dan sebagian warga yang bergabung dalam unit sampah, unit usaha PPOB masalah yang dihadapi banyak pesaing, untuk unit pariwisata permasalahan yang dihadapi untuk saat ini masih dalam perbaikan fasilitas sehingga minimnya pengunjung. Faktor utama kendala dalam implementasi program BUMDes yaitu rendahnya partisipasi masyarakat Desa Kalongan (Wawancara dengan Ibu Rahmawati, Selaku Direktur BUMDes KMJ Pada tanggal 20/ 08/2021).

Berdasarkan uraian tersebut mengidentifikasi bahwa masih ada permasalahan dalam pelaksanaan program BUMDes KMJ Desa Kalongan, sehingga penulis mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai implementasi program dan mengaitkan dengan pemberdayaan masyarakat sesuai uraian masalah, peneliti tertarik mengambil judul **“Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

2. Bagaimana hasil Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah yang ada, sehingga tujuan dan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1) Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian dalam rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.
- b. Untuk mengetahui hasil Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

2) Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis, Penelitian ini lebih fokus dalam pengembangan ilmu teori implementasi melalui pemberdayaan masyarakat dalam program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- b. Manfaat Praktis, Penelitian ini dilakukan untuk lembaga yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengelola BUMDes, masyarakat dan pemerintah setempat sebagai rujukan program pemberdayaan masyarakat oleh desa lain yang mempunyai potensi yang sama, serta diharapkan masyarakat dan pemerintah di tempat penelitian dapat menjalankan dan mengembangkan potensi Desa Kalongan melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka yang dimaksudkan dalam penelitian ini terfokuskan pada implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat di daerah yang di tentukan. Dengan ini peneliti ini tentunya menunjukkan aspek-aspek lain yang belum diteliti, berikut tinjauan pusaka yang berkait yaitu:

Pertama, Skripsi penelitian yang disusun oleh Tri Mayasari (2019), meneliti tentang *Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (studi kasus: di Desa Adijaya Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)*. Peneliti untuk mengetahui pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Adijaya dengan memberikan dampak positif bagi masyarakat melalui program BUMDes, hingga masyarakat peternak merasa bisa menambah pendapatan dengan menjual hasil kotoran ternak dan para petani bisa membeli pupuk organik dengan harga yang terjangkau.

Penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes, penelitian yang dilakukan ini sama dalam memanfaatkan potensi yang ada sehingga aktif melibatkan masyarakat desa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini lebih ke pengembangan dalam segi perekonomian dan kebudayaan, sedangkan penelitian saya bahwa program BUMDes memberdayakan masyarakat dalam segi perekonomian dan sosial dengan memanfaatkan potensi sumber daya.

Kedua, jurnal Administrasi Public yang dilakukan Chyntya Iga Ayuni dan Zainal Hiyadat (2018) dengan judul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Unit Usaha BUMDes di Desa Lerep Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Peneliti bermaksud untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor dalam mempengaruhi implementasi dari kebijakan pengelolaan unit usaha BUMDes di Desa Lerep. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data dengan

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dalam pengelolaan unit usaha BUMDes sudah berjalan selama dua tahun, sehingga sudah banyak menunjukkan perkembangan yang signifikan, selain itu pengelolaan BUMDes tidak hanya melaksanakan usaha sendiri melainkan juga mendorong pelaku atau kegiatan usaha lainnya yang ada di Desa Lerep.

Persamaan antar keduanya yaitu membicarakan pengembangan potensi lokal melalui program BUMDes. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BUMDes, serta dalam pemanfaatan sumber daya alam sudah banyak program yang dijalankan. Sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang hasil program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat Desa Kalongan.

Ketiga, Skripsi penelitian yang disusun oleh Dwi Susilowati (2020), meneliti tentang *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat desa menurut perspektif ekonomi islam (studi kasus: di Desa Isorejo pada BUMDes Sinar Harapan)*. Peneliti bermaksud untuk mengetahui peran yang dilakukan dalam mendukung pemberdayaan masyarakat, metode yang digunakan peneliti yaitu kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sudah berdiri sejak tahun 2017, sumber permodalan BUMDes berasal dari pemerintahan desa dan bantuan pemerintah-pemerintah. Pengelolaan BUMDes Sinar Harapan dari unit pertanian dapat membantu perekonomian masyarakat, sehingga bisa memenuhi kebutuhan pokok dan meringankan beban sekolah anak, karena masyarakat lebih mudah untuk mengelola pertanian dengan tersedianya bibit pertanian.

Persamaan yang dilakukan penelitian ini sama membahas tentang pengembangan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian ini lebih ke dalam peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih ke pelaksanaan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat.

Keempat, skripsi yang disusun oleh Umi Khamidah (2021), meneliti tentang *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat dalam*

Pengentasan Kemiskinan (studi kasus: di Desa Harjosari Kidul dan Desa Harjosari lor Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal). Peneliti ini bermaksud untuk mendiskripsikan implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian implementasi program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan dengan meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat dengan menggali potensi masyarakat melakukan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, dan memperbaiki sektor kesehatan.

Persamaan yang dilakukan dalam penelitian ini sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat untuk merubah, mendorong kehidupan masyarakat agar lebih maksimal. Perbedaan penelitian hanya memberdayakan masyarakat melalui pelatihan-pelatihan, sedangkan penelitian yang dilakukan ini pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan potensi melalui program BUMDes.

Kelima, skripsi yang disusun oleh Auliya Hesti Fitriana (2020), meneliti tentang *Pemberdayaan masyarakat melalui Pemanfaatan Pekarangan Rumah untuk Agribisnis (studi kasus: di Desa Blederan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*. Peneliti bermaksud untuk menguraikan tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan lahan pekarangan rumah untuk agribisnis, metode penelitian ini jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan yaitu pemanfaatan lahan pekarangan rumah yang dibiarkan kosong sehingga seorang fasilitator dengan bantuan dari *stakeholder* untuk mengajak ibu-ibu untuk menggali potensi yang ada di desa karena mata pencaharian di Desa Blederan sebagai petani sehingga memudahkan fasilitator dalam melakukan pendampingan dengan berjalannya program tersebut juga dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dengan hasil panen dan lingkungan

menjadi lebih bersih dan asri hingga sekarang Dusun Blederan dikatakan sebagai kampung wisata sayur organik.

Persamaan penelitian ini sama membahas tentang pemberdayaan masyarakat. Perbedaannya penelitian ini pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan pekarangan rumah, sedangkan penelitian yang dilakukan ini pemberdayaan masyarakat melalui program BUMDes.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang bertujuan untuk meneliti sebuah obyek, sehingga peneliti sebagai instrumen dalam penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data dilakukan secara kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih mendasarkan pada makna dari pada gagasan (Sugiyono, 2013: 18). Melakukan penelitian kualitatif di karenakan permasalahan yang dibahas oleh peneliti masih bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki lapangan (Sugiyono, 2013: 280).

Oleh karena itu, metode penelitian yang di gunakan untuk mendapatkan data dengan observasi langsung ke lapangan yang sebagaimana sesuai dengan tujuan penelitian guna mengetahui gambaran dari implementasi program Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi yang berarti ilmu tentang gejala atau hal-hal yang tampak pada hakikatnya suatu kesadaran dan interaksi yang diamati oleh peneliti. Penelitian dengan kualitatif deskriptif menggunakan fenomenologi yang ada dan sesuai dengan gambaran yang di teliti (Yusuf, 2014: 148).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan sumber data yaitu:

- a. Sumber Primer merupakan sumber data yang didapat langsung dari lapangan oleh peneliti (Sugiyono, 2013: 196). Peneliti ini menjadi sumber data primer yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan data yang dijadikan sampel dalam penelitiannya dan data diambil dari informasi lapangan. Subyek informasi sumber data ini diperoleh dari pengelola BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan.
 - b. Sumber Sekunder merupakan sumber yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti agar dapat dilakukan dengan melihat dan mendengar berupa surat-surat kabar online dan catatan yang dimiliki (Sarwono, 2006: 209).
3. Definisi Konseptual

Strategi merupakan konsep peneliti dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan sejak awal berdasarkan variabel yang di susun berdasarkan teori. Adapun definisi konseptual dalam suatu perencanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Implementasi

Implementasi merupakan pelaksanaan atau perilaku yang dilakukan secara individu atau kelompok guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan

b. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan untuk mendorong kemampuan, daya, atau kekuatan pada masyarakat dengan memberikan peluang dan memanfaatkan potensi yang ada sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat oleh karena itu dapat memandirikan masyarakat.

c. BUMDes

Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga desa yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat berdasarkan badan hukum guna memanfaatkan potensi serta mengembangkan produktivitas masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Menurut Nasution (1988), observasi adalah sebuah pengetahuan yang digunakan dalam pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan. Observasi yang dilakukan oleh peneliti ialah observasi partisipasi yang dilakukan dengan cara langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan (Sugiyono, 2013: 197-298). Metode ini digunakan agar mendapatkan data dalam pelaksanaan program BUMDes.

b. Wawancara

Definisi menurut Esterberg (2002), wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi antara dua orang untuk mendapatkan informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam penemuan permasalahan yang berada di lapangan (Sugiyono, 2013: 304). Jenis wawancara yang digunakan berupa wawancara terstruktur dengan cara mengumpulkan pertanyaan yang akan di tanyakan kepada pengelola BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mencari data dalam bentuk tulisan, gambar, dan pertemuan-pertemuan (Arikunto, 2006: 136). Metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan peneliti meliputi laporan kegiatan dan foto-foto yang dimiliki lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan.

5. Teknik Uji Validitas Data

Validitas merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan

oleh peneliti dengan daya yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2013: 361).

a. Triangulasi

Definisi triangulasi merupakan teknik pengujian kredibilitas data dengan pengumpulan data melalui menggabungkan dan mengecek data melalui berbagai sumber menggunakan cara dan waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi teknik dengan tujuan untuk mendapatkan data dengan penggalan teknik yang berbeda. Tahapan selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang berkaitan, serta dicocokkan dengan dokumentasi Peneliti dengan menghasilkan keabsahan data menggunakan teknik validitas data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2018: 315).

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Menurut Miles dan Huberman (1984) sebuah pengumpulan data lapangan dengan cara menganalisis pelaksanaan dengan tahapan-tahapan, yaitu

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Teknik yang berada di lapangan jumlahnya begitu banyak oleh karena itu perlu kita catat, teliti, dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting. Selanjutnya data yang diperoleh dapat memberikan pandangan yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan *flowchart*. Data yang digunakan untuk menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif yang tujuan untuk memudahkan pemahaman yang terjadi dengan merencanakan pekerjaan selanjutnya sesuai apa yang telah dipahami sebelumnya.

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Kesimpulan merupakan jawaban dari adanya permasalahan yang belum pernah ada. Jawaban dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang awalnya masih bersifat sementara (Sugiyono, 2018: 329).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Implementasi dalam kamus KBBI berasal dari kata i'm-ple-men-ta-si, yang berasal dari bahasa Inggris kata *Implementation* yang berarti pelaksanaan atau penerapan (Poerwadarminta, 1976: 376). Implementasi merupakan pelaksanaan undang-undang yang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk dapat menjalankan kebijakan dalam upaya meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program (Winarno, 2012: 147).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2012 mendefinisikan implementasi adalah sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan (Winarno, 2012: 149). Guntur Setiawan berpendapat, implementasi merupakan pelaksanaan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi sesuai tujuan dan kegiatan untuk mencapainya dengan memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004: 39).

Konsep implementasi yang dikemukakan oleh Lane bahwa implementasi sebagai konsep yang dibagi ke dalam dua bagian yaitu implementasi persamaan fungsi dari output dan outcome. Berdasarkan deskripsi tersebut, formula implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari tujuan, hasil produksi dan hasil akibat. Selanjutnya implementasi juga menjadi persamaan fungsi kebijakan formator, implementer, inisiator, dan waktu (Sabatier, 1986: 21-24).

Terdapat beberapa pengertian implementasi menurut para ahli, yaitu:

- a. Bernadie R. Wijaya dan Susilo Suparno, menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah proses mentransformasikan suatu rencana ke dalam praktek.
- b. Hinggis, mengartikan implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber data yang lain untuk mencapai tujuan implementasi itu agar dapat berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.
- c. Gordon, berpendapat bahwa implementasi itu sebuah kenaaan dengan berbagai kegiatan dan arahan pada realisasi program (Pasolong, 2017: 57-58).

Berdasarkan pengertian oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau perilaku secara individu atau kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam sebuah keputusan.

2. Model Pendekatan Implementasi

Implementasi dapat menggunakan beberapa faktor yang mempunyai keterkaitan satu sama lain dan berpengaruh jalannya program dalam mencapai tujuan. Selanjutnya dengan itu para ahli memaparkan model implementasi program, antara lain:

a. Teori Van Meter dan Van Horn

Menganalisis implementasi program dengan ini peneliti menggunakan model implementasi kebijakan teori menurut Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam variabel, yaitu:

1) Ukuran dan tujuan kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi kepentingan utama terhadap tujuan utama dalam pelaksanaan program dengan adanya kebijakan. Indikator keberhasilan sebuah program dapat diukur berdasarkan tujuan dalam implementasi kebijakan.

2) Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan program tergantung pada sumber yang tersedia. Sumber daya Manusia dan finansial saling berkaitan sehingga sebagai sumber terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi dengan itu dapat mendorong serta memperlancar implementasi secara efektif.

3) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksana

Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif apabila ukuran dan tujuan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu implementasi. Oleh karena itu, dalam proses ini juga sangat penting dalam memberikan perhatian tentang ukuran, tujuan, dan ketepatan dalam berkomunikasi sebagai sumber informasi.

4) Karakteristik badan pelaksana

Implementasi kebijakan yang tidak bisa lepas dari struktur birokrasi dalam karakteristik, norma, dan pola hubungan yang terjadi dalam badan eksekutif dalam menjalankan kebijakan.

5) Lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik

Keadaan lingkungan, ekonomi, sosial, dan politik menjadikan pusat perhatian yang penting karena apabila tidak sesuai dapat terjadi penghambat dalam kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

6) Kecenderungan pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana akan mempengaruhi keberhasilan kinerja implementasi, oleh karena itu dalam pelaksanaan harus disaring melalui persepsi-persepsi pelaksana yang dimana kebijakan tersebut berhasil (Winarno, 2012: 158-168).

b. Teori Jan Merse

Menurut Jan Merse dalam (Tahir, 2011: 93), menjelaskan bahwasannya implementasi kebijakan ada beberapa variabel diantaranya:

a) Informasi

Informasi sangatlah penting untuk dibutuhkan dalam penyampaian visi misi dari kebijakan yang direncanakan. Informasi dapat berjalan secara efektif jika adanya kerja sama dengan lembaga yang berkaitan.

b) Isi Kebijakan

Kebijakan public ialah guna menangani masalah public. Jelasnya isi dari kebijakan, maka akan memudahkan pelaksanaan karena nantinya implementor mampu menjalankan dalam tindakan yang nyata.

c) Dukungan Masyarakat

Dukungan yang nantinya akan digunakan lebih fokus dalam hal fisik maupun non-fisik, jadi apabila pada saat kegiatan dukungan tidak mencukupi maka implementasi kebijakan akan sulit dilaksanakan. Menurut ahlinya dukungan ini berhubungan langsung dengan peran masyarakat.

d) Pembagian Potensi

Pembagian potensi ialah membagi sebuah peran dan tanggung jawab dari aktor implementasi untuk melaksanakan tugasnya.

c. Teori David L Weimer dan Aidan R Vining (1999)

Paradigma David L Weimer dan Aidan R Vining, terdiri dari tiga variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

a) Logika Kebijakan

Pelaksanaan program yang diterapkan logis dengan dukungan secara teoritis yang bermaksud bahwa isi dari program

harus berisikan hal yang memungkinkan sehingga dapat dilaksanakan secara praktis.

b) Lingkungan Kebijakan

Lingkungan dalam implementasi kebijakan meliputi lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan fisik atau geografis, dalam pelaksanaan program ini sudah dilakukan di suatu daerah akan tetapi belum berhasil sehingga mengakibatkan perbedaan keadaan.

c) Kompetensi Implementor

Kebijakan yang berhasil akibat pengaruh tingkat kemampuan dan keterampilan dari aktor pelaksana kebijakan (Subarsono, 2015: 103-104).

Berdasarkan teori yang di paparkan para ahli di atas, terkait model implementasi, peneliti menggunakan teori Van Meter dan Van Horn sebagai landasan penelitian. Teori Van meter dan Van Horn lebih menekankan implementasi program sebagai keberhasilan pemberdayaan masyarakat yang terdapat beberapa variabel yang berhubungan seperti tujuan dan ukuran, sumber daya, agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kecenderungan pekasana, dan lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Implementasi program dengan menggunakan teori tersebut untuk melihat fenomena atau determinan apa saja yang Mempengaruhi keberhasilan dan penyebab dari adanya sebuah kegagalan program yang di laksanakan.

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

1. Pengertian BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga desa yang dibentuk oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaanya dilakukan dari pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan BUMDes dapat menjadikan sebuah usaha masyarakat dalam pemanfaatan potensi sumber daya. Selanjutnya sesuai Peraturan Menteri

Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan pengertian Badan Usaha Milik Desa yang dijelaskan oleh beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga desa yang didirikan atau dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat yang berdasarkan badan hukum untuk memanfaatkan potensi dan mengembangkan produktivitas masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat desa.

2. Tujuan BUMDes

Tujuan BUMDes dalam Menteri desa, pembangunan Daerah Tertinggi, dan Transmigrasi Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes memiliki tujuan, yaitu:

- a. Membantu perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pemanfaatan potensi.
- d. Meningkatkan komunikasi kepada lembaga yang berkait
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan untuk warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan layanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 11 Tahun 2021. Tentang Badan Usaha Milik Desa yang bertujuan:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonom melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat desa.
- c. Memperoleh keberhasilan dalam segi perekonomian sebagai peningkatan pendapatan desa dan masyarakat;
- d. Pemanfaatan aset desa untuk meningkatkan asset desa dengan baik; dan
- e. Meningkatkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, menyatakan bahwa tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes):

- a. Memberi manfaat bagi masyarakat dan desa dalam segi ekonomi pada umumnya;
 - b. Membantu dengan memberikan manfaat umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berguna bagi yang membutuhkan sesuai dengan kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.
3. Landasan Hukum BUMDes
- a. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa pasal 79.
 - 1) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa.
 - 2) Permodalan Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari:
 - a) Pemerintah Desa;
 - b) Bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - c) Pinjaman; dan/atau

- d) Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
- 3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat.
- b. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pasal 4:
 - 1) Desa dapat mendirikan BUMDes berdasarkan peraturan Desa tentang pendirian BUMDes;
 - 2) Desa dapat mendirikan BUMDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a) Inisiatif pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b) Potensi usaha ekonomi Desa;
 - c) Sumber Daya alam di Desa;
 - d) Sumber Daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
 Penyertaan modal dari pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 2013).
- 4. Prinsip Pengelolaan BUMDes

Prinsip dalam pelaksanaan program BUMDes begitu penting untuk jelaskan agar dapat dipahami seksama oleh pemerintah desa, anggota, BPD, Pemkab, dan masyarakat. Beberapa prinsip dalam pengelolaan BUMDes, diantaranya:

 - a. Kooperatif, dalam melakukan kerja sama di dalam BUMDes harus mampu melakukan kinerja yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya;
 - b. Partisipasi, semua komponen yang terlihat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela memberikan dukungan dan mengembangkan program BUMDes.

- c. Emansipasi, sebuah komponen yang terlihat di dalam BUMDes harus diperlakukan tanpa membeda-bedakan golongan, suku, dan ras.
- d. Transparan sebuah aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan dalam pelaksanaan program sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dengan mudah.
- e. Akuntabel, sebuah kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif: dan
- f. Sustainable, kegiatan usaha dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes (Ridlwani, 2015:).

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang yang mendapatkan awalan ber sehingga menjadi kata “berdaya ” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuasaan, berdaya mempunyai arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan pe- dengan mendapatkan sisipan –m- dan akhiran –an menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan (Rosmedi dkk, 2006: 1). Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang terikat oleh kesatuan bangsa, Negara, kebudayaan, dan agama (Malik, 2013: 390). Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses perjuangan kaum *powerless* dalam memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya (Supena, 2017: 32).

Menurut Suyoto Usman (2004) dikutip oleh Alfitri pemberdayaan masyarakat adalah usaha dalam memperkuat yang lazim *community self reliance* atau kemandirian. Pemberdayaan masyarakat dapat menganalisis permasalahan yang sedang dialami pada saat itu, sehingga diberikan pendampingan untuk menemukan alternatif solusi dalam masalah, yang nantinya akan di perlihatkan strategi memanfaatkan sebagai *resource* yang dimiliki dan dikuasai (Alfitri, 2011: 24).

Pemberdayaan Masyarakat menjadikan kunci dari tolak ukur keberhasilan dalam sebuah tujuan pembangunan. Pelaksanaan

pemberdayaan yang nantinya masyarakat akan dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan program. Pembangunan ini menekankan pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oleh karena itu masyarakat dapat dilibatkan dari awal pembangunan hingga hasil pembangunan, sehingga semua orang terlibat dalam perencanaan yang mempunyai kedudukan yang sederajat. Selain itu setiap orang yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat memiliki hak berperan yang sama, setiap argument terbuka terhadap kejujuran, kritik, dan teliti, sehingga dapat menjadikan komunikasi dialogis antara partisipan (Sumodiningrat, 2016: 95).

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat dalam segi ekonomi maupun administrasi dapat menempatkan masyarakat sebagai pusat perhatian ataupun sasaran utama dalam upaya pembangunan. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek akan tetapi juga sebagai subyek dalam pelaku pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang selalu meningkat, pelaksanaan pembangunan dengan pertumbuhan saja tidak cukup tanpa adanya pemerataan, sehingga pertumbuhan yang tinggal akan membawa dampak pemerataan yang positif (Sumodiningrat, 1997: 162-163). Masyarakat diajarkan untuk mandiri dengan memanfaatkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, sehingga masyarakat dapat mengimplementasikan rencana, sehingga dapat memberikan kemajuan untuk masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya.

Menurut Ife, pemberdayaan mengandung dua definisi yaitu kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan dengan maksud bukan hanya menyangkut kekuasaan politik dalam arti sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan klien atas, diantaranya:

- a. Pilihan personal dengan memberikan kesempatan-kesempatan hidup sesuai kemampuan dalam membuat keputusan-keputusan terhadap pola hidup, tempat tinggal, dan pekerjaan.
- b. Pendefinisian kebutuhan dalam memberikan kemampuan dengan menentukan kebutuhan selaras sesuai aspirasi dan keinginannya.

- c. Lembaga sesuai dengan kemampuan dalam menggunakan dan mempengaruhi pranata-pranata masyarakat, seperti lembaga kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
- d. Ide atau gagasan sesuai kemampuan mengekspresikan dan menyumbangkan gagasan dalam suatu forum atau diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.
- e. Sumber-sumber merupakan kemampuan memobilisasi yang terdiri dari sumber-sumber formal, informal dan kemasyarakatan.
- f. Aktivitas ekonomi yaitu kemampuan memanfaatkan dan mengelola mekanisme produksi, distribusi dan pertukaran barang serta jasa.
- g. Reproduksi yaitu kemampuan dalam kaitannya dengan proses kelahiran, perawatan anak, pendidikan dan sosialisasi (Alfitri, 2011: 22-23).

Pengembangan masyarakat (*Community development*) digunakan pendekatan partisipasi masyarakat dalam paradigma teori modernisasi, sedangkan pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan dalam teori ketergantungan (*dependency theory*). Pelaksanaan pengembangan masyarakat bahwasannya setiap segi sosial tidak hanya sekedar membantu masyarakat dalam mengatasi kesulitan-kesulitan atau masalah-masalah yang mereka hadapi, akan tetapi pengembangan masyarakat yang dimaksud terutama sebagai usaha dalam mengembangkan kemandirian masyarakat, dapat dilakukan dengan mengatasi permasalahan mereka sendiri (Mudhofi, 2014: 30-33).

Berdasarkan beberapa pendapat menurut para ahli di simpulkan bahwasannya pemberdayaan masyarakat adalah program yang bertujuan untuk membantu kemampuan, daya atau kekuatan kepada masyarakat dengan memberikan motivasi, peluang, dan perlindungan dengan memanfaatkan potensi yang ada dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat membantu masyarakat menjadi mandiri.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dasar dalam pemberdayaan masyarakat ialah memandirikan masyarakat dengan kemampuan yang di miliki dan potensi yang telah ada sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan, pengangguran, dan ketidak berdayaan. Menurut Mardikanto, mengemukakan tujuan pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

- a. Perbaikan pendidikan, artinya pemberdayaan dapat dilakukan dengan merubah pendidikan yang lebih baik.
- b. Perbaikan tindakan, artinya dengan memperbaiki pendidikan dengan pemanfaatan sumberdaya lokal, sehingga harapannya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat menjadi lebih baik.
- c. Perbaikan kelembagaan, artinya adanya hal diharapkan dapat memperbaiki kelembagaan yang baik dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan yang ada, sehingga lembaga dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan fungsinya.
- d. Perbaiki Usaha, artinya setelah lembaga mengalami perbaikan maka diharapkan dapat berimplikasi dengan adanya perbaikan dari lembaga dengan adanya perbaikan tersebut diharapkan dapat memberikan kepuasan dan memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat sekitar selain itu juga dapat mengembangkan lembaga agar dapat memenuhi kebutuhan kepada yang bersangkutan.
- e. Perbaikan Pendapatan, artinya perbaikan dapat diharapkan dapat memberikan perubahan dari segi sosial dan ekonomi dengan seluruh anggota lembaga.
- f. Perbaikan lingkungan bermaksud zaman sekarang ini banyak lingkungan yang belum melakukan pemanfaatan sumber daya, hal ini merupakan sebuah faktor banyaknya angka kemiskinan sehingga manusia untuk memenuhi kehidupannya melakukan tindakan yang merusak lingkungan karena terdesak, sehingga dengan adanya permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pendampingan.

- g. Perbaikan Kehidupan, artinya kehidupan manusia dapat dilihat dari indicator keberhasilan dalam hal yang dibutuhkan. Dengan adanya pendapatan yang baik sehingga ada korelasi keadaan lingkungan yang baik juga
- h. Perbaikan Masyarakat, artinya setiap kehidupan dapat dilihat dari kepribadian keluarga masing-masing, maka apabila keluarga yang baik dapat menghasilkan kehidupan kelompok masyarakat yang diharapkan. (Mardikanto, 2017: 111-112).

Pemberdayaan masyarakat kegiatan yang bertujuan untuk membantu suatu kelompok di suatu daerah yang ingin dicapai dan dikembangkan. Tujuan tersebut diharapkan masyarakat dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada sehingga dapat mencari titik permasalahan yang ada dalam lingkungan.

3. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Mathews menyatakan bahwa "*prinsip*" merupakan suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Karena setiap prinsip dapat berlaku secara umum dengan keyakinan kebenarannya dari kondisi yang beragam. Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan baik (Mardikanto, 2017: 105).

Prinsip pemberdayaan masyarakat dalam konteks politik, sosial ataupun kebudayaan diantaranya, yaitu:

- a. Gagasan pengalaman masyarakat sangat penting untuk di capainya sebuah tujuan.
- b. Prinsip dalam bersifat keadilan sosial dengan berbuat baik tanpa adanya kekerasan dan perbedaan pendapat.
- c. Prinsip dalam sebuah perubahan yang dilakukan melalui penerapan hingga keterampilan dalam melaksanakan program.
- d. Kebutuhan masyarakat untuk berpartisipasi.

- e. Prinsip pelaksanaan dalam peningkatan, hingga keberhasilan dalam pemberdayaan masyarakat (Ife, 2008: 385-286).

Pemberdayaan masyarakat yang diterapkan melalui konsep menjadikan sebuah upaya dalam membangun paradigma karena pengembangan masyarakat dapat mengikuti prinsip dasar yaitu *pertama*, berorientasi pada kesejahteraan lahir dan batin masyarakat. *Kedua*, pengembangan masyarakat dalam upaya melakukan *social engineering* (rekayasa sosial) untuk mendapatkan perubahan dalam segi sosial. Pengembangan masyarakat dilakukan tidak hanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat setempat saja melainkan sebuah rencana untuk memenuhi kebutuhan sosial bersama (Riyadi, 2021: 58-59).

4. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat sebuah upaya dalam prinsip berkelanjutan sesuai dengan programnya yang dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan dalam segi sosial dan ekonomi (Zubaedi, 2013: 77). Tim Delivery (2004) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat diawali dari seleksi lokasi hingga masyarakat mempunyai potensi untuk mengembangkan secara mandiri, diantaranya tahapan tersebut yaitu:

- a. Seleksi lokasi dilakukan agar tepat sasaran atas persetujuan pengelola dan masyarakat. Penentuan lokasi sebuah hal yang penting karena diharapkan dapat mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.
- b. Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dengan berkomunikasi kepada masyarakat agar mempermudah pelaksanaan dengan cara sosialisasi yang akan membantu pemahaman masyarakat dan pihak yang berkaitan dengan adanya program, agar sesuai dengan tujuan dalam pemberdayaan masyarakat.
- c. Proses pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk membantu kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Proses dalam pemberdayaan masyarakat bersama melakukan hal yaitu:
 - 1) Mengidentifikasi dengan mengkaji potensi wilayah dan permasalahan beserta peluang-peluangnya. Dengan tujuan agar

masyarakat mampu dan percaya diri dalam mengidentifikasi serta menganalisis keadaan.

- 2) Membuat rancangan kegiatan.
- 3) Melaksanakan rancangan kegiatan yang sudah disusun bersama dengan adanya fasilitator yang akan memberikan fasilitas dalam implementasi kegiatan yang sudah direncanakan dari awal.
- 4) Melihat proses hingga dampak yang didapat dalam kegiatan secara terus menerus secara partisipasi (Mardikanto, 2017: 125).

5. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat merupakan kegiatan yang ingin dicapai, oleh karena itu setiap kali melakukan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kinerja untuk mencapai tujuan yang di tetapkan. Menurut Mardikanto menyatakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dapat memperhatikan upaya-upaya yaitu:

- a. Meningkatkan komitmen agar mendapatkan dukungan dalam bentuk kebijakan, sosial, dan finansial.
- b. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam segi sosial.
- c. Memberikan fasilitas kerja para fasilitator.
- d. Meningkatkan keemanfaatan dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal untuk mensejahterakan masyarakat (Mardikanto, 2017: 172).

6. Indikator Pemberdayaan masyarakat

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari indicator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberdayaan masyarakat untuk mencapai tujuan secara baik, yaitu:

- a. Berkurangnya jumlah masyarakat yang miskin
- b. Meningkatkan produksi dengan membantu pendapatan masyarakat di sekitar lingkungannya.
- c. Membantu masyarakat agar tetap peduli dengan tujuan mensejahteraan masyarakat di lingkungannya.

- d. Meningkatnya kapasitas masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditandai dengan kemandirian masyarakat dalam memanfaatkan potensi secara baik sehingga dapat membantu masyarakat dalam segi sosial dan ekonomi (Sumodiningrat, 1997: 134).

Teori indikator menurut mardikanto terdapat pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mengukur keberhasilan pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- a. Penduduk dapat tertarik untuk gabung dari setiap kegiatan program yang dilaksanakan.
- b. Meningkatkan jumlah kehadiran setiap warga pada saat pelaksanaan kegiatan.
- c. Tingkat kemudahan dalam melaksanakan program untuk Mempengaruhi pertimbangan dengan persetujuan masyarakat atas inovasi yang dikemukakan.
- d. Jumlah pendapat dari masyarakat yang dikemukakan untuk mengembangkan sebuah program.
- e. Jumlah pendapatan yang di dapat dari masyarakat untuk meningkatkan program.
- f. Meningkatkan kapasitas skala dalam partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
- g. Meningkatkan kepedulian dan respon terhadap perlunya peningkatan kehidupan masyarakat.
- h. Meningkatkan pemandirian dalam segi kesehatan masyarakat (Mardikanto, 2017: 291-292).

7. Metode Pemberdayaan Masyarakat

Metode merupakan suatu cara dalam sebuah proses kegiatan untuk menyusun suatu kegiatan melalui gagasan dengan maksud tertentu. Adapun metode pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Metode *Rapid Rural Appraisal (RRA)*

Rapid Rural Appraisal merupakan penilaian keadaan desa secara cepat dalam praktek kegiatan RRA dilakukan oleh masyarakat

luar (tenaga profesional) dengan mengajak masyarakat setempat. RRA merupakan cara yang digunakan penilaian secara relatif “terbuka, cepat, dan bersih” (*fairly-quickly—lean*).

Adapun prinsip dasar RRA Mardikanto 2017 menulis dalam bukunya sebagai berikut:

- 1) Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya dan dibandingkan terhadap informasi yang dibutuhkan
- 2) Triangulasi sebagai sumber informasi dengan melibatkan anggota agar bertanya dengan beragam perspektif.
- 3) Belajar dengan masyarakat
- 4) Belajar cepat melalui eksplorasi (Mardikanto, 2017: 199-200).

b. Metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*

Participatory Rural Appraisal (PRA) merupakan proses pembelajaran semi struktur atau tahap lanjutan dari RRA. Metode PRA ini dilakukan secara kelompok orang yang terdiri dari “orang dalam” yang terdiri dari *stakeholder* dan difasilitasi oleh orang-orang luar.

Selanjutnya ada tahapan yang digunakan dalam metode ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemetaan wilayah dan kegiatan yang sesuai dengan topic keadaan.
- 2) Analisis keadaan diantaranya:
 - a) Keadaan masa lampau, sekarang, dan dimasa yang akan depan.
 - b) Mencari penyebab yang terjadi dan alasan-alasan atau penyebabnya.
 - c) Menemukan akar masalah dan alternatif-alternatif pemecahan masalah.
 - d) Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau analisis SWOT (Strength, weakness, opportunity, and threat) terhadap semua alternatif pemecahan masalah.

- 3) Penentuan alternative dalam pemecahan masalah yang paling layak dilaksanakan secara efisien dan diterima oleh sistem sosial.
- 4) Rincian pelaksanaan tentang *stakeholders* dan peran yang diharapkan dari para pihak dengan jumlah dan sumber-sumber pembiayaan yang di sesuaikan untuk melaksanakan program atau kegiatan yang direkomendasikan (Mardikanto, 2017: 200-201).

c. FGD FGD (*Focus Group Discussion*)

FGD dipakai sebagai metode wawancara kepada sekelompok informan secara terfokus. Selanjutnya FGD sendiri digunakan diskusi secara kelompok yang terarah dengan melibatkan semua anggota yang akan dipandu dan diberikan fasilitas oleh fasilitator. Mardikanto menyebutkan tahapan metode FGD sebagai berikut:

- 1) Menjelaskan tujuan FGD
- 2) Mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan
- 3) Menentukan dalam pemilihan anggota yang terlibat setiap anggota dalam kepentingan yang berkompeten
- 4) Persiapan ruang diskusi
- 5) Pelaksanaan diskusi
- 6) Analisis data dari hasil diskusi
- 7) Penulisan laporan (Mardikanto, 2017: 201-202).

d. SL atau Sekolah Lapangan (*Farmer Field School*)

Metode sebuah kegiatan yang dilakukan secara beruntun dengan pertemuan rutin yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terlibat dalam program dengan pemecahan masalah melalui pertemuan untuk berdiskusi. Kegiatan belajar SL biasanya mendapat pendampingan dari fasilitator yang berkompeten (Mardikanto, 2017: 204).

e. Pelatihan Partisipatif

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan dengan adanya pelatihan-pelatihan yang mempunyai berbagai macam

metode yang dirancang untuk Pendidikan Orang Dewasa (POD) dengan ciri seorang fasilitator memberikan pendampingan kepada masyarakat dan lebih mengutamakan sebuah proses yang dilakukan terhadap program (Mardikanto, 2017: 204-205).

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang

1. Keadaan Geografis dan Batas Wilayah

Desa Kalongan merupakan salah satu desa di Kecamatan Ungaran Timur dengan luas wilayah sebesar 868, 3 ha (22, 85% dari total luas Kecamatan Ungaran Timur). Desa Kalongan secara geografis berada pada ketinggian 339 M dari permukaan laut sesuai dengan RT dan RW. Wilayah Desa Kalongan terdiri dari 12 dusun 17 RW, dan 86 RT (Profil Desa Kalongan, 2020). Selanjutnya batas wilayah Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat : Desa Kalirejo dan Desa Leyangan
- b. Sebelah Utara : Desa Mluweh dan Desa Susukan
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Bergas
- d. Sebelah Timur : Desa Kawengen dan Kecamatan Bergas

Table 3. 1
Luas Wilayah Desa Kalongan

No	Jenis	Luas
1	Tanah Sawah	76 ha
2	Tanah Kering	553 ha
3	Tanah Perkebunan	102,3 ha
4	Tanah Fasilitas Umum	70 ha
5	Tanah Hutan	62 ha

Sumber: Profil Desa Kalongan 2022

Gambar 3. 1
Peta Deasa Kalongan



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti 2022

Desa Kalongan telah ditetapkan sebagai sistem perwilayahan 1 yaitu kawasan yang diarahkan sebagai fungsi-fungsi industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan, dan berdasarkan fungsi pusat Satuan Wilayah Pengembang (SWP), selanjutnya desa kalongan mempunyai visi misi “Mewujudkan Masyarakat Desa Kalongan Yang Maju Mandiri Sejahtera Dengan BUMDes Sebagai Poros Pembangunan”

Table 3. 2
Struktur Organisasi Desa Kalongan

No	NAMA	JABATAN
1	Yarmuji	Kepala desa
2	Fajar Abu Rizky	Sekretaris desa
3	Afifudin	Bendahara desa
4	Muntasir	Kasi Umum
5	Nasikun	Kaur Pemerintahan
6	Siswadi	Kaur Pembangunan
7	Bahrudin	Kaur Kemasyarakatan
8	Rohadi	Kadus Dampu
9	Mursid	Kadus Kajangan
10	UT Usman	Kadus Ngaliyan
11	Sodiq	Kadus Sipete
12	Haddadul Waton	Kadus Bulu
13	Qomarodin	Kadus Mendiro
14	Damanhuri	Kadus Kalongan
15	Sunarno	Kadus Rejowinangun
16	Sunoto	Kadus Tompogunung
17	Raden Trinanda Septiandi	WEB Admin
18	Diah Puspitosari	Tenaga Teknis
19	Isna Rohmawati	BUMDes

Sumber: Profil Desa Kalongan 2021

2. Keadaan Demografi Desa Kalongan

Secara umum Desa Kalongan menjadi salah satu desa yang direncanakan secara berkelanjutan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat dengan mengembangkan potensi lokal sebagai desa sadar wisata. Desa Kalongan berperan ke dalam Sub Wilayah Pengembangan (SWP-1) yang mempunyai fungsi dalam jaringan industri, pertanian, pariwisata, pemerintahan, perdagangan, dan jasa fasilitas umum.

Desa Kalongan juga memiliki pusat pelayanan pemerintahan meliputi Kantor Kecamatan Ungaran Timur, Kantor Polisi, Dinas Kehutanan, dan Kantor Urusan Agama (KUA). Akses jalan yang masih rusak dengan banyaknya lubang dan berbahan dasar batu atau tanah sehingga apabila musim hujan, jalanan menjadi licin dan membahayakan pengguna jalan. Jalan Desa Kalongan merupakan salah satu jalan yang menghubungkan Desa Kalongan dengan desa disekitarnya dengan pusat kota Kecamatan Ungaran Timur (Profil Desa Kalongan, 2020). Secara demografi, pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Kalongan tercatat sebanyak 13,647 jiwa, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.3
Jumlah Penduduk Desa Kalongan

No	Keterangan	Jumlah
1	Laki-Laki	6,774
2	Perempuan	6,873
	Jumlah	13,647

Sumber: Data Monografi Desa Kalongan, 2022

Kesimpulan bahwa tabel di atas bahwa tercatat tahun 2022 warga di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur sebesar 13,647 jiwa, dengan jenis kelamin laki-laki 6,774 Jiwa dan jenis kelamin perempuan 6,873 Jiwa, dengan jumlah kepala keluarga (KK) sebesar 4,496 jiwa. Dengan demikian kita dapat melihat bahwa jumlah penduduk perempuan melebihi

jumlah laki-laki yang ada di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang.

3. Keadaan Penduduk berdasarkan Usia

Sesuai data yang di dapatkan bahwa keadaan penduduk menurut umur di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur sebagai berikut:

Table 3. 4
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia

No	Usia	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 Tahun	550	548	1,098
2.	5-9 Tahun	594	614	1,208
3.	10-14 Tahun	635	533	1,168
4.	15-19 Tahun	505	499	1,004
5.	20-24 Tahun	433	456	889
6.	25-29 Tahun	450	528	978
7.	30-34 Tahun	577	609	1,186
8.	35-39 Tahun	544	604	1,148
9.	40-44 Tahun	602	559	1,161
10.	45-49 Tahun	460	476	936
11.	50-54 Tahun	355	414	769
12.	55-59 Tahun	332	332	664
13.	60-64 Tahun	287	277	564
14.	65-69 Tahun	198	162	360
15.	70-74	118	82	200
16.	≥75	134	180	314
	JUMLAH TOTAL	6,774	6,873	13,647

Sumber: Data Monografi Desa Kalongan tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur, berdasarkan jumlah terbesar terdapat pada kelompok usia 40-44 Tahun dengan jumlah 1,161 jiwa, sedangkan jumlah terendah terdapat pada kelompok usia 70-74 Tahun dengan jumlah 200 jiwa. Sesuai umur jumlah total jenis kelamin perempuan berjumlah 6,873 Jiwa dan jenis laki-laki dengan jumlah 6,774 jiwa. Jadi menurut jumlah umur penduduk Desa Kalongan sejumlah 13,647 jiwa. Berdasarkan jumlah penduduk Desa Kalongan dengan umur produktif lebih tinggi oleh karena itu kami harapkan dapat membantu kebutuhan yang non produktif.

4. Kondisi Keagamaan

Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur dengan jumlah penduduk 13,647 Jiwa. Sistem keagamaan Desa Kalongan terjadi antar kelompok dan individu di dalamnya menjadi lebih dekat sehingga tercipta sebuah lingkungan sosial yang harmonis yang dimana masyarakatnya saling membantu satu dengan yang lain. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada tabel sebagai berikut:

Table 3. 5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	6,432	6,550	12,982
2.	Katholik	117	108	225
3.	Kristen	221	214	435
4.	Budha	4	1	5

Sumber: Data Monografi Desa Kalongan, 2022

Gambar 3. 2
Sarana Beribadah



Sumber: Dokumentasi oleh peneliti, 2022

Data tabel dan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kalongan lebih banyak pemeluk agama Islam dengan jumlah 12,982 Jiwa, sedangkan jumlah terendah ada pada agama Budha dengan jumlah 5 Jiwa. Meskipun ada perbedaan dalam pemeluk agama di masyarakat Desa Kalongan, interaksi masyarakat Desa Kalongan sangat terjalin sangat baik dalam kegiatan sosial desa, seperti kegiatan pos ronda

yang biasanya terjalin untuk menjaga keamanan, gotong royong untuk tetap menjaga lingkungan.

5. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian merupakan pekerjaan yang menjadi pokok penghasilan dalam kehidupan. Mata pencaharian dapat diimplementasikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat desa. Keadaan penduduk menurut mata pencaharian di Desa Kalongan yaitu sebagai berikut:

Table 3. 6
Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	1,819	1,762	3,581
2	Mengurus Rumah Tangga		960	960
3	Pelajar/Mahasiswa	934	888	1,822
4	Pension An	40	21	61
5	Pegawai Negeri Sipil	83	43	126
6	Tentara Nasional Indonesia	48	1	49
7	Kepolisian Ri	18	3	21
8	Perdagangan	7	23	30
9	Petani/Pekebun	216	156	372
10	Nelayan/Perikanan	1		1
11	Industri		2	2
12	Transportasi	1		1
13	Karyawan Swasta	1,530	1,483	3,013
14	Karyawan Bumh	12	6	18
15	Karyawan Bumd	1		1
16	Karyawan Honorer	5	1	6
17	Buruh Harian Lepas	1,058	853	1,911
18	Buruh Tani/Perkebunan	11	6	17
19	Buruh Peternakan			
20	Pembantu Rumah Tangga	1		1
21	Tukang Batu	3		3
22	Tukang Jahit		1	1
23	Mekanik	4		4
24	Pendeta	1		1
25	Ustadz/Mubaligh	1		1
26	Dosen	3	1	4
27	Guru	18	42	60
28	Pengacara		1	1

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
29	Dokter	2	1	3
30	Bidan		6	6
31	Perawat	5	11	16
32	Pelaut	2		2
33	Sopir	12		12
34	Pedagang	11	17	28
35	Perangkat Desa	10		10
36	Kepala Desa	1		1
37	Wiraswasta	916	583	1,499
38	Lainnya		2	2
JUMLAH TOTAL		6,774	6,873	13,647

Sumber: Data Monografi Desa Kalongan, 2022

Berdasarkan data yang didapat dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Kalongan Masyarakat yang berjumlah 13,647 mempunyai mata pencaharian yang beragam. Mayoritas bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan jumlah 1,911 Jiwa dan selebihnya mereka bekerja sesuai dengan potensi masing- masing.

6. Kondisi Pendidikan Desa Kalongan.

Pendidikan merupakan sebuah upaya penting yang menjadi perhatian dalam pemanfaatan potensi sumber daya. Desa Kalongan terfasilitasi prasarana pendidikan. Terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Keatas (SMK). Berikut data tingkat pendidikan Desa Kalongan:

Table 3. 7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendiidkan

No	Jenis Pendidikan	Laki	Pr	Jumlah
1	Tidak/ belum Sekolah	1,919	1,961	3,880
2	Belum Tamat SD/Sederajat	513	458	971
3	Tamat SD/ Sederajat	1,458	1,463	2,921
4	Sekolah Menengah Pertama	1,039	1,220	2,259

No	Jenis Pendidikan	Laki	Pr	Jumlah
5	Sekolah Menengah Atas	1,479	1,351	1,830
6	Diploma I/II	11	20	31
7	Akademi/Diploma III	87	142	229
8	Stara I	256	249	505
9	Stara II	8	8	16
10	Stara III	4	1	5
	JUMLAH TOTAL	6,774	6,873	13,647

Sumber: Data Monografi Desa Kalongan, 2022

Berdasarkan data di atas menyatakan bahwa keadaan menurut tinggi pendidikan Desa Kalongan yaitu tergolong standar. Penduduk Desa Kalongan yang tamat akademik atau perguruan tinggi sebanyak 786 Jiwa. Sedangkan masyarakat Desa Kalongan yang tamat SD-SLTA lebih banyak dari pada yang tamat akademik atau perguruan tinggi.

Gambar 3. 3 **Sarana Pendidikan Desa Kalongan**



Sumber: Dokumentasi oleh peneliti, 2022

Berdasarkan gambar di atas pendidikan Desa Kalongan terfasilitasi prasarana pendidikan yang menunjang. Terdiri dari Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar Islam Terpadu, Sekolah Menengah Pertama, dan Madrasah Aliyah. Prasarana sekolah menengah pertama yang berada di RW 008

yang mudah diakses oleh kendaraan bermotor sehingga banyak warga yang meraih pendidikan di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur.

B. Gambaran Umum BUMDes KMJ Desa Kalongan

1. Profil Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya

Badan Usaha Milik Desa merupakan lembaga desa yang berdiri atas dasar disahkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Desa Kalongan membentuk Badan Usaha Milik Desa atau yang sering disebut BUMDes. Pertama adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini sejak tahun 2017 sesuai dengan peraturan Desa Kalongan berdasarkan Nomor 02 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan. Pada tahun 2022 BUMDes Kalongan Mandiri Jaya semakin berkembang, sehingga berjalan kurang lebih 5 tahun terakhir.

Berdirinya BUMDes KMJ Desa Kalongan di karenakan pemerintah desa membentuk lembaga dengan mengelola potensi Desa Kalongan dalam membantu perekonomian masyarakat dengan mengurangi angka kemiskinan masyarakat. BUMDes KMJ Desa Kalongan pada awalnya hanya Unit Pariwisata Curug Gending Asmoro yang terletak di Dusun Tompo Gunung Desa Kalongan dengan berdirinya Unit pariwisata tersebut untuk memanfaatkan sumber daya alam (Wawancara dengan Ibu Rahmawati, selaku Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 16 /01/2022).

Peluang sumber daya sehingga menjadikan Bapak Yarmuji sebagai Kepala Desa Kalongan pada tahun 2017 mempunyai inovasi untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam Unit persampahan yang dimana menjadi permasalahan bagi masyarakat dalam hal kesehatan dan kebersihan. Permasalahan tersebutlah menjadikan pemerintah desa mengajak masyarakat untuk memanfaatkan sarana dan tetap menjaga kebersihan. Pengelolaan unit dapat menjadikan Masyarakat Desa Kalongan semakin meningkatkan tingkat kesejahteraannya karena dapat terbantu dalam perekonomian dan sosial.

Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan berawal mengelola unit pariwisata, seiring berjalannya waktu pada tahun 2019 kepala desa dan BPD memilih Direktur BUMDes untuk lebih mengembangkan potensi lokal dengan menambah unit untuk membantu pendapatan yang diamana sesuai dengan visi misi Desa Kalongan. Unit yang ada hingga saat ini diantaranya (1). Unit Pariwisata, (2). Unit Persampahan, (3). Unit Usaha Sembako, (4). Unit PPOB Perpajakan. Sehingga dapat memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal.

2. Visi dan Misi BUMDes Kalongan Mandiri Jaya
 - a. Visi BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur merupakan Membangun Desa Kalongan yang Inovatif, Mandiri, Tertib, dan Sejahtera.
 - b. Misi Desa Kalongan
 - 1) Mewujudkan masyarakat Desa kalongan yang berkehidupan sejahtera dengan mambangun BUMDes sebagai poros pembangunan;
 - 2) Mewujudkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dengan memantapkan pembangunan infrastruktur dasar;
 - 3) Ekonomi serta meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam rangka mengisi pembangunan yang berkeadilan sosial, keagamaan, dan berwawasan lingkungan.

Table 3. 8
Struktur Organisasi BUMDes KMJ

No	Nama	Jabatan
1.	Yarmuji Amd	Komisaris
2.	Isna Rahmawati S.P	Direktur
3.	Afifudin	Sekretaris
4.	Diah Puspitosari	Bendahara
5.	Suhaji	KA Unit Pariwisata
6.	Muhammad Ali	KA Unit Persampahan

7.	Nevia	KA Unit PPOB
8.	Devi Ardiyani	KA Unit Sembako

Sumber: Data BUMDes KMJ Desa Kalongan, 2022

Berdasarkan tabel di atas bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KMJ Desa Kalongan ini berdiri atas dasar pemerintah desa membentuk suatu organisasi yang ingin membantu pemanfaatan potensi dengan mengembangkan perekonomian masyarakat Desa Kalongan. Pengelolaan BUMDes KMJ Desa Kalongan juga sebagai sarana dalam pemberdayaan masyarakat karena dengan sarana tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan memandirikan masyarakat.

3. Sejarah BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan. Kecamatan Ungaran Timur

Badan Usaha Milik Desa mulai dirilis pada tahun 2013 dan berawal atas dasar penggalian gagasan dan strategi pendirian BUMDes yang pada awalnya pemerintah desa mengadakan musyawarah desa dalam pembuatan peraturan desa tentang BUMDes. Setelah terealisasi peraturan desa tahap selanjutnya melakukan pembentukan kelembagaan BUMDes. Selanjutnya setelah adanya kelembagaan dalam pengurusan program BUMDes tahap yang ketiga penyusunan program bisnis yang akan dijalankan dalam pemanfaatan potensi lokal. Pembentukan Unit usaha dalam BUMDes sesuai dengan peraturan desa, setelah adanya BUMDes mulailah dibumihkan kepada masyarakat bahwasannya di Desa Kalongan ada program dalam pemberdayaan masyarakat.

Pengembangan potensi desa dengan memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat sehingga dengan hal tersebut diperlukan adanya suatu wadah untuk mendorong tumbuhnya usaha-usaha yang baru dan mengembangkan usaha-usaha yang telah ada dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang alokasi dananya dari pemerintah desa dan daerah. Pada prinsipnya pendirian BUMDes merupakan pilihan desa

dalam menggerakkan ekonomi atas dasar hukum terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa. Pendirian BUMDes didasarkan atas prakarsa desa yang mempunyai jenis usaha dibidang: (1) Jasa, (2) Penyaluran Sembilan bahan pokok, (3) Perdagangan hasil pertanian, (4) Pariwisata, (5) Industri kecil dan rumah tangga, (6) Kontraktor dan perdagangan umum, (7) Jenis usaha lain sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Data AD/ART BUMDes Desa Kalongan 2018) .

Seperti yang telah disampaikan oleh Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, bahwasannya:

“Alhamdulillah mbak dengan adanya BUMDes masyarakat desa banyak yang terbantu dalam perekonomian walaupun belum begitu besar tetapi untuk pendapatan sudah mulai berkembang seperti kemarin pas masa pandemic banyak warga yang dirumahkan dan pada saat itu BUMDes KMJ dipilih sebagai BUMDes penyuplai Bansos dari JPS Provinsi sehingga warga banyak warga yang membantu sekedar packing sehingga dapat membantu pendapatan walaupun belum seberapa” (Wawancara dengan Ibu Rahmawati, selaku Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 16/01/2022).

Pengelolaan BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan ini diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat yaitu dengan membantu perekonomian masyarakat dan mendorong dalam pemanfaatan potensi lokal. Pengembangan BUMDes KMJ Desa Kalongan dilakukan melalui berbagai cara agar dapat mengubah mindset masyarakat Desa Kalongan. BUMDes KMJ Desa Kalongan berdiri sesuai dengan visi misi Desa Kalongan yang dimana sebagai desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

a. Tujuan dan Maksud Berdirinya BUMDes KMJ Desa Kalongan

- 1) Maksud dibentuknya BUMDes Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, menggerakkan perekonomian rakyat, membantu dan mendorong percepatan pembangunan desa serta merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

- 2) Tujuan dibentuknya BUMDes Desa Kalongan sebagai wadah usaha yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat (Data AD/ART BUMDes Desa Kalongan 2018) .

KMJ

- b. Logo BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan
 - 1) Tulisan KMJ merupakan singkatan dari kalongan mandiri jaya
 - 2) Warna hijau pada tulisan berarti wawasan lingkungan desa kalongan
- c. Tugas komisaris sebagai Penasehat BUMDes KMJ Desa Kalongan
 - 1) Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direktur dalam menjalankan kegiatan pengelolaan BUMDes.
 - 3) Menetapkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Pemerintah Desa bersama BPD, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap BUMDes (Data AD/ART BUMDes Desa Kalongan 2018) .
- d. Tugas Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan
 - 1) Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUMDes KMJ Desa Kalongan.
 - 2) Menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada komisaris untuk mendapatkan pengesahan.
 - 3) Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan komisaris.
 - 4) Membina Pegawai.
 - 5) Mengurus dan mengelola kekayaan BUMDes KMJ Desa Kalongan.

- 6) Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan.
- 7) Mewakili BUMDes KMJ Desa Kalongan baik di dalam maupun di luar pengadilan: dan
- 4) Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca perhitungan laba/ rugi kepada komisaris (Data AD/ART BUMDes Desa Kalongan 2018) .

4. Program Unit Usaha BUMDes KMJ Desa Kalongan.

Pemerintah Desa Kalongan membentuk BUMDes sebagai wadah dan penggerak dalam bidang perekonomian dan sosial desa. BUMDes juga dibentuk dalam pengoptimalisasi pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di Desa Kalongan. Pemerintah Desa Kalongan mendirikan unit kegiatan dalam BUMDes, diantaranya:

a. Unit Usaha Pariwisata

Unit usaha pariwisata bergerak dalam bidang wisata alam dalam memanfaatkan sumber daya alam berupa wisata Curug Gending Asmoro. Wisata alam ini sepenuhnya dikelola oleh masyarakat Desa Kalongan dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah desa dalam mengoptimalkan wisata alam dengan ini juga mendapat pendampingan dari pokdarwis dan Dinas Pariwisata. Pengelolaan wisata alam dalam program BUMDes KMJ Desa Kalongan sesuai dengan peraturan desa Desa Kalongan yang bertujuan agar dapat memberikan dampak positif untuk masyarakat. (Wawancara dengan Bapak Suhaji, selaku Ketua Unit Pariwisata, pada 01/07/2022).

Gambar 3. 4 Unit Usaha Periwisata



Sumber: Dokumentasi BUMDes KMJ Desa Kalongan, 2022

Berdasarkan gambar 3.4 di atas bahwa dalam unit pariwisata ini menjadikan sebuah pemanfaatan potensi sumberdaya yang berada di Desa Kalongan yang telah di rawat secara baik oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Kalongan. Pariwisata menjadi salah satu program BUMDes yang mana manfaat untuk mengembangkan desa sebagai desa sadar wisata dengan tujuan guna memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, seperti mampu membuka lapangan pekerjaan.

b. Unit Usaha Persampahan

Unit usaha yang bergerak dalam persampahan dalam jasa pembuangan sampah rumah tangga seperti sampah organik dan an-organic. Unit usaha ini bergerak karena membantu masyarakat menjaga kesehatan dan kebersihan dalam kehidupan sehari-harinya. Jasa pengambilan sampah berjalan dengan sistem keanggotaan yang setiap bulan membayar dengan tarif sebesar Rp 15.000/rumah, masyarakat Desa Kalongan yang sudah terdaftar menjadi anggota unit persampahan sampai tahun 2022 ini sebanyak ± 500 anggota. Tujuan dalam unit usaha persampahan ini di gunakan untuk membantu menangani permasalahan persampahan dan menyadarkan masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan yang bersih dan sehat (Wawancara dengan Bapak Ali, selaku ketua unit persampahan, pada 16/07/2022).

Gambar 3. 5
Unit usaha persampahan



Sumber: Dokumentasi TPS Desa Kalongan, 2022

Berdasarkan gambar di atas bahwa unit persampahan ini mempunyai sarana 1 Unit mobil beroda 4 (alat angkut sampah) untuk pengambilan sampah milik warga yang nantinya dibuang ke TPS Desa Kalongan yang berlokasi di Dusun Mendiro. Unit persampahan ini banyak yang sudah bergabung khususnya masyarakat Desa Kalongan akan tetapi dalam unit persampahan ini belum bisa melakukan pengelolaan dalam pemanfaatan sampah, jadi dalam unit ini masih dalam pengambilan sampah warga Desa Kalongan

c. Unit Usaha PPOB (*Payment Point Online Bank*)

Unit usaha ini bergerak dalam sistem pembayaran online dengan memanfaatkan fasilitas dengan tujuan membantu masyarakat di Desa Kalongan khususnya. Masyarakat Desa Kalongan yang mayoritas bekerja dari pagi hingga larut malam sehingga pemerintah desa menyediakan unit usaha yang dapat dimanfaatkan secara baik dalam hal pembayaran listrik, pajak. Akan tetapi dalam unit usaha ini masih berjalan secara rentah dan bisa dikatakan kurangnya signifikan yang dimana disebabkan banyaknya pesaing dari luar (Wawancara dengan MBak Nevia, selaku Ketua Unit PPOB BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/07/2022).

d. Unit Usaha Sembako

Unit usaha ini bergerak dalam pengelolaan dan perdagangan sembako berupa beras, minyak goreng, dan bahan-bahan pokok. Unit usaha ini membeli beras dari petani yang berada Desa Kalongan dan nantinya beras tersebut di cek langsung oleh Dinas Sosial. Unit usaha ini bekerja sama dengan E-warung yang sudah di tunjuk oleh desa sebagai tempat pengambilan bantuan sosial warga Desa Kalongan.

Unit usaha ini bekerjasama dengan para petani dan masyarakat desa dengan cara membeli dengan harga yang layak dan menjualnya dengan harga yang standar dari harga pasar, karena segmentasi pasar unit usaha sembako ini adalah warga Desa Kalongan dan Sekitarnya. Unit usaha sembako Desa Kalongan ini juga sudah terpilih untuk menjadi supplier bahan-bahan pokok ke BUMDes yang ada di Ungaran Timur khususnya. Pengamangan unit usaha sembako ini metode yang digunakan dalam pemasaran bahan-bahan sembako ini dengan media sosial sesuai dengan kebutuhan warga Desa Kalongan (Wawancara dengan Ibu Ardiyani, selaku K.U Sembako BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 20/07/2022).

C. Implementasi Program BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan

Implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan ini sesuai dengan Peraturan Desa dalam undang-undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMDes KMJ dalam keberadaan program diharapkan dapat mengimplementasikan dan memberikan kontribusi kepada masyarakat Desa Kalongan, meskipun BUMDes KMJ Desa Kalongan baru berjalan kurang lebih \pm 5 tahun, namun dalam mengimplementasikan program sudah dapat membantu membantu pendapatan masyarakat desa dan memberikan informasi kepada masyarakat dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Model dalam implementasi program ini bersifat linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan

kinerja publik. Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan oleh peneliti dari data wawancara dan observasi, maka dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ukuran dan Tujuan

Pelaksanaan program tidak terlepas dari sebuah peraturan sebagai landasan dari implementasi. Ukuran dan tujuan menjadi poin dalam menjalankan program, dapat dikatakan sebagai kunci berhasilnya program. Suatu implementasi dapat dilihat sesuai dengan kinerja sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan dengan adanya hal tersebut dapat membuktikan sejauh mana kegiatan yang dilakukan secara menyeluruh.

Implementasi program BUMDes KMJ Desa Kalongan berdiri atas dasar aturan pemerintah desa yang bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat dengan diidentifikasi dan diukur sesuai dengan tujuan-tujuan yang dipertimbangkan. Pengimplementasian program BUMDes menjadi ukuran dalam pemberdayaan masyarakat membantu perekonomian, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan bahwa:

“Pas tahun 2017 Pemerintah Desa dan BPD mendirikan lembaga BUMDes sesuai dengan peraturan desa dengan ukuran sebuah Program BUMDes khususnya dalam memberdayakan masyarakat itu dari kita membuka lapangan pekerjaan, jadi warga ikut dalam pengelolaan BUMDes mbak khususnya di unit sampah, unit usaha sembako, disitu masyarakat banyak yang membantu berjalannya program”(Wawancara dengan Ibu Rahmawati selaku Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, 16/01/2022).

Berdasarkan wawancara yang dinyatakan bahwa BUMDes KMJ Desa Kalongan berdiri atas dasar peraturan desa No 02 Tahun 2013 tentang BUMDes. Akan tetapi BUMDes mulai disahkan pada tahun 2017. Peningkatan BUMDes hingga saat ini sudah menjang tinggi dalam pemanfaatan potensi lokal dan masyarakat juga sudah banyak yang terbantu dengan adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan. Berikut pernyataan yang disampaikan oleh sekretaris BUMDes KMJ Desa Kalongan bahwasannya:

“Program BUMDes ini kan sesuai dengan perdes mbak dan didalam perdes dapat dikatakan tujuannya untuk pemanfaatan potensi lokal dan membantu pendapatan masyarakat, dan alhamdulillah sampai sekarang BUMDes telah memberdayakan masyarakat” (Wawancara dengan Bapak Afifudin selaku Sekretaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, 19/05/2022).

Hasil wawancara yang telah dipaparkan maka ukuran dalam program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat sudah sesuai target awal pembentukan. Sesuai dengan program setiap implementasi diharapkan selain mempunyai ukuran juga mempunyai tujuan-tujuan. Program BUMDes KMJ Desa Kalongan dibuat atas dasar membantu pendapatan dan menjadikan desa yang mandiri dan berdaya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Kepala Desa atau Komisaris BUMDes Desa Kalongan, bahwa:

“Tujuan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat ya pastinya untuk membantu perekonomian mbak dengan membuka lapangan pekerjaan, selain itu tujuan umumnya dapat membantu pendapatan asli desa (PAD) Desa Kalongan, rangka meningkatkan potensi lokal, menjaga untuk hidup sehat” (Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Table 3. 9
Rekapitulasi Dana Desa Kalongan

Pendapatan	Tahun	Total Dana
Rp. 74.000.000	2018	
Rp. 84.100.000	2019	
Rp. 86.350.000	2020	
Rp. 92.150.500	2021	
		Rp. 336.600.500

Sumber: Anggaran pendapatan Desa Kalongan

Berdasarkan tabel di atas bahwa dengan pendirian BUMDes KMJ Desa Kalongan, bahwa pengelolaan program BUMDes KMJ Desa Kalongan di tahun pertama pengelolaan mendapatkan dana sebesar 74.000.000 dengan dana tersebut di gunakan untuk mengembangkan program BUMDes. Implementasi program dari tahun ke tahun mengalami peningkatan secara signifikan sehingga pada tahun 2021 mendapatkan dana sebesar Rp. 92.150.500 sehingga dengan pendapatan dari program BUMDes KMJ Desa Kalongan dapat meningkatkan pendapatan Desa Kalongan.

Pengelolaan program BUMDes memang perlu dibentuk, sehingga Pemerintah Desa kalongan mengadakan musyawarah desa dengan pembuatan peraturan desa tentang BUMDes, dengan anjuran pemerintah pusat Desa Kalongan memiliki inisiatif membentuk BUMDes KMJ Desa Kalongan dibentuk atas dasar peraturan desa No 02 Tahun 2013 tentang BUMDes, karena BUMDe KMJ Desa Kalongan sama seperti halnya sebuah poros pembangunan desa yang dapat meningkatkan dalam segi perekonomian. Berdasarkan ukuran dan tujuan sebuah kebijakan dalam program BUMDes, dapat di ukur dari keberhasilan atau tidaknya program tersebut. Program BUMDes KMJ Desa Kalongan diukur keberhasilannya dalam pemberdayaan masyarakat dari seberapa banyak masyarakat ikut berpartisipasi dalam program BUMDes KMJ Desa Kalongan.

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam kehidupan menjadikan sebuah hal yang sangat penting dalam melakukan program. Sumberdaya dalam implementasi program perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Pelaksanaan program dukungan dari sumber daya manusia karena dalam menjalankan program hingga mendapatkan hasil yang berkualitas. Selain sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program diperlukannya sumber daya finansial dalam mendorong keberhasilan program BUMDes. Proses dalam menjalankan program

BUMDes KMJ Desa Kalongan yang menjadikan faktor pendukung pertama ialah sumber daya manusia. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, sebagai berikut:

“Jadi gini mbak direktur itu nantinya dipilih sesuai dengan AD/ART yang akan dipilih oleh kepala desa selaku komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan. Sumber daya manusia dalam kepengurusan BUMDes ini akan langsung di tentukan oleh direktur” (Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku Komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Hasil wawancara yang senada selanjutnya disampaikan oleh kepala unit sampah. Berikut kutipan wawancara yang disampaikan oleh

“saya bekerja sampai kuwalahan mbak, sehingga saya selaku ketua unit ini mencari masyarakat desa saya ajak bekerja” (Wawancara dengan Bapak Ali, selaku ketua unit persampahan, pada 16/07/2022).

Selanjutnya hal ini setara dengan apa yang disampaikan oleh pengelola Unit Pariwisata, bahwasannya:

“BUMDes itukan ada direktur dan komisaris, selanjutnya mereka membentuk pos-pos unit yang di setiap unit nya ada PJ selanjutnya kepala unit itu yang bekerja dan mengawasi di tiap-tiap pos nya, kalo saya di sini ya sebagai pengelola, perawat wisata ini mbak” (Wawancara dengan Bapak Suhaji, selaku ketua unit pariwisata, pada 01/07/2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwasannya sumber daya manusia dalam menjalankan program BUMDes KMJ Desa Kalongan sudah sesuai dengan Pearturan Desa Kalongan. Pelaksanaan program BUMDes juga dapat membantu perekonomian masyarakat desa dengan adanya beberapa unit usaha BUMDes. Maka hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa dalam perekrutan pengurus sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Akan tetapi nantinya jika di lapangan merasa kurang memadai dari setiap ketua unit dapat mengajak masyarakat

yang dapat diajak bekerja dalam menjalankan program. Pelaksanaan program BUMDes juga diperlukannya yang namanya sumber daya finansial yang dapat mendorong implementasi program BUMDes KMJ Desa Kalongan. Hal ini disampaikan oleh Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan sebagai berikut:

“Dana dalam pengelolaan BUMDes, kita ada bantuan modal dari desa tentunya, selebihnya ya kita gunakan dana dari perputaran setiap programnya yang sudah ada ketentuan sendiri kalo seperti itu mbak” (Wawancara dengan Ibu Rahmawati, selaku Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 16/01/2022).

Hasil wawancara yang disampaikan oleh pimpinan BUMDes dalam Pelaksanaan dari setiap unit usaha mendapatkan dana yang berbeda-beda dalam menjalankan program, salah satunya adalah di unit pariwisata yang mana sumber daya finansial yang didapatkan seperti yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Pengelolaan unit usaha dari pertama kali buka sampai sekarang ya saya mbak yang mengelola ibarat kata dari merintis sampai alhamdulillah sudah mendapatkan hasil yang memuaskan laaah, pertama kali unit pariwisata ini ada pada tahun 2017 dan mendapat dana sebesar Rp. 150.000.000,-, dana tersebut kita gunakan untuk membuka wisata Curug Gending Asmoro yang berada di Dusun Tompo Gunung hingga saat ini, alhamdulillah sudah kembali dan mendapatkan hasil lebih dari modal awal, setiap pengunjung kita kenakan tarif Rp. 5.000/ orang” (Wawancara dengan Bapak Suhaji, selaku ketua unit pariwisata, pada 01/07/2022).

Bentuk penghasilan yang didapatkan dari setiap unit usaha mempunyai perbedaan, selanjutnya penghasilan yang di dapat dipergunakan untuk perkembangan unit usaha tersebut, setara dengan yang disampaikan sebelumnya dan di tanggap oleh ketua unit persampahan, bahwasanya:

“Keuangan dari hasil sampah saya langsung kasih ke ketua mbak, nanti dia yang mengurus semuanya, tetapi bulan-bulan

terakhir ini saya langsung yang mengelola pengeluaran, pemasukan sampai pembayaran ke bank ya saya mbak, setiap rumah membayar sebesar Rp. 15.000/Bulan” (Wawancara dengan Bapak Ali, selaku ketua unit persampahan, pada 16/07/2022).

Table 3. 10

Sumber dana yang di dapat BUMDes KMJ Desa Kalongan

Sumber	Rincian	Total Dana
Pemerintah Pusat	Rp. 291.886.000	
Pemerintah Desa	Rp. 100.000.000	
BUMDes		
Unit Pariwisata	Rp. 50.000.000	
Unit Persampahan	Rp. 70.000.000	
Unit PPOB	Rp. 6.000.000	
Unit Sembako	Rp. 20.000.000	

Sumber: Dana BUMDes KMJ Desa Kalongan (Alokasi pendapatan dana)

Berdasarkan data di atas bahwa dalam program BUMDes dari setiap unitnya sudah mendapatkan bantuan dana dalam segi finansial. Selanjutnya dalam pengembangan setiap Unit Usaha dilakukan dengan perputaran modal yang di dapat, BUMDes menjadikan poros perekonomian bagi desa dan masyarakat Desa Kalongan. Berdasarkan dari kedua sumber daya tersebut saling berkaitan. Sumber daya manusia menjadi sebuah penggerak dalam program BUMDes yang sudah dijadikan poros pembangunan desa yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Selain itu dalam sumber daya finansial juga sangatlah berkaitan dalam memajukan program BUMDes.

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana

Komunikasi menjadikan sebuah dasar dalam implementasi program agar bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil secara

efektif. Pencapaian sebuah tujuan program harus berkomunikasi kepada bagan-bagan pengelola yang menjalankan program, semakin sering dalam melaksanakan komunikasi antar sesama kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi program yang semakin berjalan secara baik yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Pelaksanaan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan komunikasi yang baik kepada masyarakat dan para *stakeholder* yang terkait. Pelaksanaan implementasi program dalam memberdayakan masyarakat dapat dilihat hal-hal tersebut jelas sangat dibutuhkan informasi, kejelasan antara ketua dengan anggotanya agar pelaksanaan dalam pengelolaan BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara baik. Adapun hasil wawancara yang disampaikan Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, bahwasannya:

“Semua kegiatan BUMDes pasti ada yang namanya komunikasi antar pengelola mbak, jadi saya melaksanakan tugas sebagai direktur ini ya hasil dari musyawarah desa yang sesuai dengan AD/ART BUMDes, selebihnya saya memberikan pendampingan kepada pengurus-pengurus dari setiap ketua unit dalam berkoordinasi mengenai program kami melakukan rapat bulanan, selain itu juga ada rapat tahunan yang dihadiri oleh pengurus lembaga, masyarakat desa yang model nya perwakilan dan pemerintah desa, disitu kami membahas berjalan nya BUMDes selama setahun itu dan kedepannya mau bagaimana” (Wawancara dengan Ibu Rahmawati, selaku Direktur BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 16/01/2022).

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Kalongan, bahwasannya:

“Dalam melaksanakan program BUMDes yang jelas kita ada mbak komunikasi dengan pihak yang berkaitan seperti Unit Persampahan kita berkoordinasi dengan dinas DLH Kab Semarang” (Wawancara dengan Bapak Abu, selaku Sekretaris Desa Kalongan, pada 19/05/2022).

Gambar 3. 6
Dinas Lingkungan Hidup Kab Semarang



Sumber: Dokumentasi kerjasama dengan DLH Kab Semarang, 2022

Berdasarkan data yang didapatkan dapat ditarik kesimpulan tentang kejelasan serta keterbukaan pengelolaan atau pengurus BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus pas jam kerja dan ruang kerja. Pelaksanaan komunikasi dilakukan untuk membantu kekurangan antar kelembagaan desa, sehingga dari pekerja dan pengelola tidak terlalu formal dalam implementasi program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat.

4. Karakteristik agen Pelaksana

Agen pelaksana menjadikan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan implementasi program. Agen pelaksana terdiri organisasi formal dan informal. Pelaksanaan program tidak lepas dari struktur birokrasi yang berkaitan dengan karakteristik, norma dan pola. Implementasi program menjadikan sebuah hal yang sangat penting karena dalam kinerja yang dilakukan sangat banyak mempengaruhi oleh para pelaksana. Perwujudan implementasi program BUMDes KMJ Desa Kalongan menjadikan sebuah hal penting dalam menjalankan program, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan bentuk kerjasama para agen pelaksana dalam mewujudkan implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Kalongan, bahwasannya:

“Kalo Pelaksanaan program ya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan akan mendapat pendampingan dari pemerintah desa yang telah pemegang saham dan mendapat pembinaan dari lembaga, dari BUMDes juga ada marketingnya lo mbak. Ada juga kendala bagi masyarakat itu ada yang masih belum memahami tentang BUMDes dan belum tau manfaatnya, ya ini kan basic nya di desa ya mbak jadi mungkin ada juga yang masih mempunyai sifat apreory (alah mboh luweh laaah)” (Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku Komisariss BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Gambar 3. 7
Permasalahan Unit usaha persampahan



Sumber: Dokumentasi Permasalahan Unit Persampahan, 2022

Pernyataan senada yang di tanggapi oleh Ketua Unit Persampahan, bahwasannya:

“apa yang saya lakukan ya sesuai dengan apa yang pimpinan saya katakana mbak, saya disini selain sebagai pengambilan sampah juga sebagai pemasaran unit usaha persampahan, kalo hambatanya kita ada apa pemanfaatan sampah, jadi kita baru melakukan pengambilan terus di buang di TPS Desa Kalongan” (Wawancara dengan Bapak Ali, selaku ketua unit persampahan, pada 16/07/2022).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya, dalam pelaksanaan program di unit sampah yang dilakukan oleh pengelola. Aktivitas dalam unit persampahan pada dasarnya dilakukan sekitar seminggu 2 kali dalam pengambilan di setiap rumah-rumah warga

dan dibuang ke TPS Desa Kalongan, setelah itu sampah akan di pilah oleh pekerja unit persampahan antara sampah organik dan anorganik. Sampah anorganik dipilah kembali yang masih dapat bernilai ekonomis untuk di loakan. Selanjutnya sampah yang sudah berada di TPS nantinya akan diambil oleh DLH Kab Semarang di buang ke TPA yang berada di Desa Blondo yang dilakukan setiap harinya.

Gambar 3. 8
Pembuangan sampah di TPA



Sumber: Dokumentasi pembuangan sampah ke TPA Blondo, 2022

Table 3. 11
Rekapitulasi Keuangan Unit Persampahan BUMDes KMJ

Pemasukan	Pengeluaran	TOTAL
Rp.8.980.000	Biaya Perawatan Rp. 3000.000	
	Gaji Karyawan Rp. 3.500.000	
	Lain-lain Rp. 500.000	
Rp. 8.980.000	Rp 7000.000	Rp 1. 980.0000

Sumber: Data BUMDes KMJ 2020 (Anggaran belanja terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemasukan di setiap bulannya masih ada sisa yang dapat digunakan untuk pengembangan unit usaha persampahan, terkadang antara pemasukan dan pengeluaran lebih tinggi pengeluarannya. Sehingga dalam unit persampahan masih dalam proses pengambilan saja belum ada

pengelolaan sampah yang nantinya dapat dimanfaatkan menjadi pupuk. Unit usaha persampahan ini dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dan tetap menjaga kesehatan masyarakat. Pelaksanaan program persampahan BUMDes KMJ Desa Kalongan

Selanjutnya pernyataan yang berkaitan dengan kerjasama yang telah disampaikan oleh ketua Unit PPOB, bahwasannya.

“Pelaksanaan Unit usaha PPOB itu pembayaran secara online mbak, sekarang ini kan banyak masyarakat yang bertransaksi terkait dengan pembayaran online, jadi kami bekerjasama dengan Kantor Pos, Bank BRI yang kita jadikan agen, ya ibar kayak Indomaret mbak mekanismenya. Hambatan kita ada pada banyaknya pesaing mbak” (Wawancara dengan Mbak Nevia, selaku Ketua Unit PPOB BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/07/2022).

Hal ini setara dengan yang disampaikan oleh Ketua Unit Usaha Sembako, bahwasannya:

“Ya kita bekerja sama dengan Ewarung yang sudah dipilih oleh BUMDes, akan tetapi kalau di unit sembako ini lebih besarnya kita sebagai suplier ketika ada program Pemerintah terkait pengambilan bantuan, jadi kita tidak ngecer ke warga mbak karena kalo ngecer matekke warung-warung yang berjualan sembako. Kalo hambatan ya pastinya pesaing ya mbak, masyarakat juga belum begitu banyak yang gabung mbak” (Wawancara dengan Ibu Ardiyani, selaku K.U Sembako BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 20/07/2022).

Berdasarkan informasi dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam agen pelaksana cukup memadai secara moral dan materi yang diberikan oleh agen pelaksana. Bentuk kerjasama yang didapatkan juga sudah cukup bagus karena para agen pelaksana selalu membimbing dalam segi fasilitas dan prasarana yang diperlukan oleh BUMDes. Selain itu dalam hambatan yang terjadi dalam program yang paling penting sebagai pelaksana dapat mengubah mindset masyarakat yang masih awam dengan adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan.

5. Sikap/ Kecenderungan para Pelaksana

Pengelolaan program dapat dikatakan berhasil atau tidaknya dalam kinerja implementasi program dapat ditentukan dengan sikap penerima dalam menolak atau menerima program dari agen pelaksana. Maka dari itu dalam pelaksanaan program dapat terjadi kegagalan dalam suatu implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat sering terjadi diakibatkan ketidaktaatan terhadap tujuan dan ukuran dasar. Pelaksana program dijadikan sebuah hal yang penting karena sikap yang dimiliki telah mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain. Sikap penerima dalam pelaksanaan program ikut dalam pengelolaan BUMDes dapat diawali dengan penguatan program dengan membentuk kepengurusan BUMDes. Seperti yang disampaikan oleh Komisariss BUMDes KMJ Desa Kalongan, sebagai berikut:

“Perdes yang sudah dibuat oleh pemerintah desa dan BPD yang diajukan oleh kepala desa, aturan tersebut tentang BUMDes seperti tugas dari direktur selanjutnya penentuan struktur kepengurusan, di dalam perdes kepala desa sebagai komisariss BUMDes, selanjutnya ya pengurus dari setiap unitnya itu di pilih langsung, untuk tim pembantu ya kepala unit yang menentukan sendiri dia membutuhkan atau tidak, tapi biasanya tetep membutuhkan jadi nanti kepala unit itu mengajak anggota, selain itu juga melibatkan lembaga-lembaga yang ada di desa seperti karangtaruna, pokdarwis, dan BPD” (Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku Komisariss BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah desa memiliki perhatian penting dalam pemanfaatan potensi lokal sehingga membentuk lembaga BUMDes sebagai poros perkembangan perekonomian masyarakat Desa Kalongan. Pelaksanaan program sesuai dengan aturan yang mendasari tentang BUMDes ada pada Undang-Undang No 02 Tahun 2013 di dalam aturan tersebut menyebutkan tentang tujuan dan manfaat dalam mendirikan BUMDes. Hal ini sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris Desa Kalongan, bahwasanya:

”Kemampuan dalam pengelolaan BUMDes kita sebagai pemerintah desa ya selalu mengayomi mbak karena lembaga BUMDes ini ibarat seperti perusahaannya desa, Sampai saat ini pelaksanaannya cukup bagus dan sudah menunjukkan hasil yang baik, apalagi dalam pemberdayaan masyarakat mbak” (Wawancara dengan Bapak Abu, selaku Sekretaris Desa Kalongan, pada 19/05/2022).

Pernyataan disampaikan Ketua Unit Pariwisata BUMDes KMJ Desa Kalongan, bahwasannya:

“Kemampuan dalam pengelolaan di unit pariwisata ya cukup bagus karena saya juga mendapat arahan dari ketua mbak, saya ikut kerja di sini dari masa perintisan mbak sampai sekarang ini mbak” (Wawancara dengan Bapak Suhaji, selaku ketua unit pariwisata, pada 01/07/2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penguatan kelembagaan dengan membentuk BUMDes yang sesuai dengan mekanisme. Penguat dalam pelaksanaan program BUMDes diperkuat dengan adanya peraturan desa Undang-Undang No 02 Tahun 2013 tentang BUMDes. Pengelolaan program disisi lain pemerintah desa juga melakukan pendampingan dan memfasilitasi sarana kepada pengurus BUMDes dalam menjalankan program dan sesuai peraturan desa juga sudah tertera tugas dari setiap pengurus BUMDes. Akan tetapi, sayang sekali dengan adanya pemanfaatan potensi lokal ini belum seluruh warga Desa Kalongan ikut andil dalam pemanfaatan potensi.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Implementasi program dalam lembaga BUMDes tidak lepas dari lingkungan eksternal tersebut berupa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu kegiatan masyarakat. Kondisi sosial dan ekonomi sangat berperan atau berpengaruh besar dalam keberhasilan program BUMDes karena untuk meningkatkan partisipasi dalam penanggapi masyarakat dengan adanya BUMDes, apabila kondisi sosial dan ekonomi kurang kondusif dapat menjadikan sumber permasalahan dan kegagalan

dalam kinerja implementasi program. Kondisi dalam pelaksanaan program BUMDes bagaimana dapat membantu taraf kenaikan atau perubahan masyarakat dalam segi ekonomi atau sosial. Adapun hasil wawancara kepada Kepala Desa, bahwasannya:

“Bentuk partisipasinya ya dengan mengikuti program untuk menjadi anggota dari program, Unit usaha BUMDes” (Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku Komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Begitu juga yang di sampaikan oleh Ketua Unit Pariwisata BUMDes KMJ Desa Kalongan, bahwasannya:

“Bentuk partisipasi dari pemerintah desa ataupun dari pemerintah daerah banyak yang merespon baik untuk Desa Kalongan ini, seperti di unit pariwisata kita sudah mendapatkan dukungan dari dinas pariwisata, pokdarwis dan pas pertama kali pembukaan banyak partisipasi dari masyarakat luar desa yang ikut memeriahkannya” (Wawancara dengan Bapak Suhaji, selaku ketua unit pariwisata, pada 01/07/2022).

Selanjutnya selain kepengurusan BUMDes yang mendukung adanya program, masyarakat juga mendukung jalannya BUMDes, seperti yang disampaikan oleh masyarakat Desa Kalongan sebagai berikut:

“Saya sebagai masyarakat mbak, ya pastinya selalu mendukung adanya ini selagi demi kemajuan desa, saya sekali di kasih tau kalo ada pengambilan sampah ya saya mendukung, sampai sekarang saya masih mengikuti program pengambilan sampah BUMDes itu mbak” (Wawancara dengan Ibu Senah, selaku anggota persampahan, pada 28/07/2022).

Table 3. 12
Anggota Unit Usaha Persampahan

No	Nama Anggota
1	Ibu Isaroh
2	Ibu Astuti
3	Ibu Nanik
4	Ibu Ariyani
5	Ibu Ayu
6	Ibu Dwik
7	Bapak Sodik

No	Nama Anggota
8	Bapak Sulis
9	Bapak Joko
10	Bapak Prass
11	Bapak Ngatiman
12	Ibu Tanti
13	Bapak Hartono
14	Bapak Alfin
15	Bapak Suyatno
16	Ibu Phita
17	Ibu Senah
18	Bapak Agil
19	Bapak Suradi
20	Ibu Rini

Sumber data: Dokumentasi data BUMDes KMJ, 2022

Pernyataan setara dengan apa yang di sampaikan oleh masyarakat Desa Kalongan Ibu Siti, bahwasannya:

“Ya selagi itu untuk memajukan desa dan membantu warganya ya saya akan mendukung to nok, apalagi kalo seperti yang sampean katakan tadi dapat membantu fakir miskin, kalo mengikuti programnya saya tidak mbak, ya kalo melakukan pembuangan sampah ya saya bakar mbak ada yang saya buang ke TPS Desa mbak” (Wawancara dengan Ibu Siti, selaku masyarakat Desa Kalongan, pada 20/07/2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat selalu mendukung dengan adanya program BUMDes. Implementasi program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dalam segi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Kalongan. Oleh karena itu dalam hal sosial masyarakat Desa Kalongan dapat dibilang cukup baik, dan dalam perekonomian masyarakat dapat terbantu dengan adanya program BUMDes, lingkungan politik juga tidak terlepas dari pemerintahan baik daerah maupun desa yang cukup mendukung jalannya BUMDes. Pengimplementasian program dalam pemberdayaan masyarakat sudah dapat dibilang bagus dan efektif.

D. Hasil Implementasi Program BUMDes dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan

Hasil yang terjadi dalam implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat menjadikan sebuah akhir dalam kegiatan pemberdayaan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dari antusias masyarakat Desa Kalongan dengan adanya lembaga BUMDes KMJ Desa Kalongan. Pemberdayaan tersebut sebagai bentuk peningkatan masyarakat dalam pemanfaatan potensi lokal.

Pemberdayaan nampak dengan adanya hasil yang bisa dilihat dari segi fisik maupun non fisik. Selanjutnya dalam segi fisik berupaya dengan lingkungan, sedangkan dalam non fisik dapat dilihat dalam segi perekonomian dan sosial masyarakat. Program BUMDes yang dilakukan oleh pemerintah desa dan pengurus kelembagaan sesuai dengan visi misi Desa Kalongan. Adapun hasil dalam pemberdayaan masyarakat, diantaranya:

1. Perekonomian

Keberhasil dalam sebuah proses pembangunan tidak dapat diukur melalui finansial yang diperoleh oleh masyarakat secara individu maupun kelompok. Pembangunan dalam melakukan sebuah perubahan dapat dilihat seberapa besar mereka dalam melakukan perubahan. Pada segi ekonomi dalam program BUMDes bertambahnya pendapatan masyarakat.

Pendapatan tersebut lah yang akan digunakan dalam pemenuhan perekonomian dalam upaya membantu kesejahteraan keluarga. Kegiatan yang terjadi selalu dibutuhkan oleh masyarakat berupa kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Seperti pernyataan yang disampaikan Kepala Desa, bahwasannya:

“Alhamdulillah BUMDes ini ada sejak tahun 2017 dan dalam menjalankan kita sesuai dengan visi misi, disamping visi utamanya kan dapat membantu pendapatan asli desa, selain itu dalam sisi memberdayakan ya kita membuka lapangan pekerjaan dan membantu distribusi produk masyarakat dan menggali potensi”

(Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku Komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Selanjutnya dengan adanya program BUMDes ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, seperti yang disampaikan Ibu Nik. Bahwasanya:

“Ikut di BUMDes ada manfaatnya mbak, sekarang selain saya bisa bekerja di jam yang efektif saya juga masih bisa ngurus rumah. Ya lumayan bisa buat nambah-nambah pendapatan keluarga” (Wawancara dengan Ibu Nik, selaku karyawan Pariwisata, pada 02/07/2022).

Table 3. 13
Rekapitulasi Keuangan Unit Pariwisata BUMDes Desa Kalongan

Tahun	Pemasukan	Pengeluaran	Total
2018	Rp. 35.000.000	Sarana, prasarana	Rp. 7.200.000
		Gaji	Rp. 15.600.000
2019	Rp 40.000.000	Sarana Prasarana	Rp. 7.500.000
		Gaji	Rp. 18.000.000
2020	Covid-19	-	-
2021	Covid-19	-	-
2022	10.000.000	Gaji	7.000.000
		Sarana prasarana	1.500.000

Sumber: Data BUMDes KMJ (Anggaran Belanja Terlampir)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pemasukan BUMdes unit pariwisata di setiap tahunnya mengalami peningkatan dan dari jumlah pemasukan yang didapat masih terdapat sisa dana yang digunakan untuk mengembangkan unit usaha pariwisata dan menjadi kas dana desa.

Pernyataan yang setara dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Pasimin sebagai berikut:

“Saya kerja di persampahan BUMDes ini juga masih baru mbak, tetapi saya bersyukur mbak saya ikut bekerja di pengambilan sampah milik BUMDes ini, jadi aku bisa mendapatkan hasil upah yang sesuai dengan kerjaan saya, selain itu aku juga bisa melakukan pilah sampah mbak, jadi selain saya mendapat gaji dari BUMDes saya juga mendapat hasil jual rosok” (Wawancara dengan Bapak Pasimin, selaku karyawan persampahan, pada 28/07/2022).

Gambar 3. 9
Pilah sampah



Sumber: Dokumentasi BUMDes KMJ Desa Kalongan, 2022

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Ketua unit persampahan, bahwasannya:

“Saya ikut di sampah BUMDes sudah lama mbak, ya alhamdulillah dari saya masih muda sampai berkeluarga ya dari hasil kerja di persampahan ini, sampai sekarang saya sudah memberikan nafkah keluarga ya dari hasil Persampahan mbak” (Wawancara dengan Bapak Ali, selaku ketua unit persampahan, pada 16/07/2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya dalam implementasi program BUMDes sudah dapat memberdayakan masyarakat Desa Kalongan, karena dari pemerintah desa dan kepengurusan BUMDes juga membantu perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu bahwa masyarakat Desa Kalongan setelah adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan dapat memberdayakan masyarakat dengan membawa perubahan untuk masyarakat dan desa ke dalam jenjang yang lebih baik dalam segi perekonomian dan sosial.

Table 3. 14
Daftar pekerja BUMDes KMJ Desa Kalongan

No	Nama	Jabatan
1.	Yarmuji	Komisaris
2.	Isna Rahmawati	Direktur
3.	Afifudin	Sekretaris
4.	Diah Puspitasari	Bendahara
5.	Suhaji	K.A Unit Pariwisata
6.	Muhammad Ali	K.A Unit Persampahan
7.	Nevia	K.A Unit PPOB
8.	Devi Ardiyani	K.A Unit sembako
9.	Pasimin	Pekerja Persampahan
10.	Nik	Pekerja Pariwisata
11.	Pendi	Pekerja Pariwisata
12.	Asep	Pekerja Pariwisata
13.	Mamat	Pekerja Pariwisata
14.	Rini	Pemilik warung

Sumber: BUMDes KMJ Desa Kalongan, 2022.

Selanjutnya berdasarkan tabel di atas telah menunjukkan bahwa masyarakat juga terlibat pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KMJ Desa Kalongan. Sehingga dengan adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan menjadikan masyarakat terbantu perekonomian untuk kebutuhan rumah tangga seperti pangan, sandang, listrik, biaya pendidikan anak, dan kebutuhan lainnya. Masyarakat dapat mengurangi pengangguran dengan bergabung di BUMDes, hal ini menjadikan masyarakat terbantu pendapatan kesehariannya. Pendapatan dari segi perekonomian dengan adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan dan bergabung dalam BUMDes, sehingga dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya.

2. Segi Sosial

Segi sosial dalam program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dapat dianalisis dari berbagai narasumber dalam perubahan dari aspek sosial dengan adanya perubahan kehidupan masyarakat dalam menjaga lingkungan kebersihan dan kesehatan masyarakat, meningkatkan

partisipasi masyarakat untuk bergotong royong dalam pembangunan wisata curug gending asmoro. Pengelolaan program diawali dengan pertemuan dalam mencari inovasi pemanfaatan potensi lokal, dan pertemuan dilakukan oleh pemerintah desa dan mengajak warga dari setiap RW dalam rangka memajukan kegiatan. Pemberdayaan masyarakat dalam program BUMDes guna mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dimanfaatkan kedepannya. Seperti yang disampaikan Kepala Desa Kalongan, bahwasannya:

“Alhamdulillah untuk Segi sosial dalam perdes itukan ada sebagian persen hasil BUMDes untuk didistribusikan kepada warga miskin” (Wawancara dengan Bapak Yarmuji, selaku Komisaris BUMDes KMJ Desa Kalongan, pada 28/06/2022).

Selanjutnya pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Suhaji selaku ketua Unit Pariwisata, bahwasannya:

“Untuk kepedulian masyarakat dalam kegiatan wisata ini belum ada niatan secara ikhlas untuk membantu, sehingga mereka itu hanya mengandalkan kalo ada bantuan akan tetapi satu hal saya itu salut pada saat pembukaan wisata karena banyak relawan yang datang dari warga desa, kesenian drumblek, dan relawan luar juga ikut memeriahkan pembukaan” (Wawancara dengan Bapak Suhaji, selaku ketua unit pariwisata, pada 01/07/2022).

Segi sosial dalam lingkungan seperti yang disampaikan oleh Ibu Senah selaku masyarakat, bahwasannya:

“Ya mbak saya menjadi anggota pengambilan sampah sudah lama pas awal itu saya mendapat fasilitas tong kecil untuk tempat sampah, jadi saya anggap dengan ikut ini menjadikan lingkungan menjadi bersih dan nggak kesusahan dalam membuang sampah dalam jenis apapun” (Wawancara dengan Ibu Senah, selaku anggota persampahan, pada 28/07/2022).

Pernyataan tersebut mendapat tanggapan dari Mbak Menik putri dari orang tau yang mendapat Bantuan Sosial Desa, bahwasanya:

“Ya ndok sebulan pisan ki mak e entok bantuan sembako kadang ya uang, ya bantuan kui seko desa, mengko jipok e neng warung seng biasa gawe jipok bantuan e ndok” (Wawancara dengan Mbak

Menik, selaku anggota BANSOS Desa Kalongan, pada 20/07/2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwasannya hal sosial dalam pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan baik karena dapat meningkatkan kepedulian kepada masyarakat dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Akan tetapi juga masih perlu mengubah pola pikir masyarakat terhadap kepedulian lingkungan. Pengimplementasian program BUMDes terbangun antara masyarakat, pemerintah desa, dan kepengurusan lembaga BUMDes dengan bersosialisasi dan pendampingan program. Kegiatan sosial yang dijalankan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat diperlukannya interaksi tinggi oleh masyarakat Desa Kalongan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur

Hasil penelitian yang dilakukan baik dari data wawancara, observasi langsung di lapangan, dan hasil dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti. Pada bab ini peneliti menganalisis sesuai dengan tujuan penelitian yaitu implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang. Implementasi program tidak lepas dari pendampingan pemerintah desa dan dukungan dari masyarakat untuk mencapai tujuan program. Proses dalam program dapat dikatakan berhasil dari partisipasi masyarakat. Sehingga sebegus apapun program yang dijalankan tanpa adanya partisipasi dari masyarakat tidak akan memberikan hasil (Alfitri, 2011: 34).

Teori Van Meter dan Van Horn dalam Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan secara individu atau kelompok yang mempunyai arah untuk mencapai tujuan dalam program yang sudah ditetapkan secara kebersamaan (Winarno, 2012: 149). Pelaksanaan program tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berkaitan melainkan juga adanya dukungan dari masyarakat sekitar. Tanpa adanya dukungan dan pendampingan yang kuat dalam setiap program, maka pembangunan tidak berjalan secara efektif.

Program BUMDes Kalongan Mandiri Jaya penting dalam mewujudkan perkembangan ekonomi masyarakat dan membantu pendapatan desa yang dimana sesuai dengan pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KMJ merupakan lembaga desa yang didirikan oleh pemerintah desa dan kepemilikan modal berasal dari desa, setra pengelolaanya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat sesuai dengan Peraturan Desa Kalongan dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi dalam pemanfaatan sumber daya.

Implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membantu ekonomi masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Membantu perekonomian masyarakat dengan harapan berdampak positif untuk kesejahteraan masyarakat. Lembaga BUMDes menjadikan poros perekonomian masyarakat dan desa. BUMDes KMJ Desa Kalongan merupakan lembaga desa yang sudah berjalan kurang lebih 5 tahun dan sudah ada beberapa jenis unit usaha.

Keberadaan BUMDes dapat melihat adanya tujuan pemberdayaan masyarakat yang ada yaitu untuk perbaikan tindakan yang diharapkan dengan hal tersebut dapat memperbaiki tindakan dengan beragam dalam sumber daya yang ada dan mendorong masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan mencapai tujuan yang sesuai. Menurut Suyono Usman, pemberdayaan masyarakat adalah proses setiap anggota untuk memandirikan masyarakat melalui pemanfaatan potensi yang mereka miliki (Mardikanto, 2017: 52).

Pendekatan dalam konsep pemberdayaan masyarakat berdasarkan dengan adanya tahapan pemberdayaan masyarakat menurut Delivery (2004) yang diawali dari seleksi lokasi, dalam upaya ini dilakukan sesuai dengan karakteristik agar mencapai apa yang sudah menjadi harapan lembaga, pemerintah desa, dan masyarakat. Kedua sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam upaya mengkomunikasikan kegiatan program yang di jalankan oleh pihak yang berkait dengan masyarakat. Ketiga proses pemberdayaan masyarakat hakikatnya dalam hal tersebut untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pemanfaatan potensi yang ada (Mardikanto, 2017: 125).

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Susilowati (2020) bahwasannya dalam program BUMDes dapat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini dapat membantu masyarakat terutama dalam kebutuhan pokok, dan sebagai aset penggerak ekonomi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. BUMDes Sinar Harapan ini mempunyai unit pertanian dan persawahan, selain itu dalam pemberdayaan masyarakat berupa penyuluhan

dan pelatihan pertanian yang sudah mulai berkembang dalam meningkatkan perekonomian (Susilowati, 2022: 3).

Tujuan pendirian BUMDes dalam undang-undang nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, dan pengelolaan BUMDes, yaitu: Untuk meningkatkan perekonomian dalam kesejahteraan desa, membantu usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi sumber daya, membuka lapangan pekerjaan, dan membantu pendapatan desa ataupun masyarakat. Landasan pelaksanaan BUMDes didukung dengan adanya alokasi dana yang di dapatkan menurut Undang- Undang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pasal 79, bahwa permodalan BUMDes berasal dari pemerintah desa, pemerintah pusat, dan kepengurusan BUMDes yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat dengan adanya dana digunakan untuk pengembangan BUMDes.

Hal tersebut sesuai dengan teori Van Meter dan Van Horn yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga dapat menguraikan proses dengan melihat bagaimana keputusan dalam program yang dimana dijelaskan, yakni Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Komunikasi antar organisasi, Agen pelaksana, Kecenderungan pelaksana, Kondisi ekonomi dan sosial (Winarno, 2012: 158-168). Berdasarkan teori yang sudah dipaparkan, peneliti menggunakan teori implementasi program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) KMJ Desa Kalongan, dari data wawancara dan dokumentasi yang sudah peneliti dapatkan. Sehingga peneliti akan mengklasifikasikan diantaranya:

1. Ukuran Dan Tujuan

Implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadikan tolak ukur keberhasilan program BUMDes. Berawal bendirinya BUMDes KMJ Desa Kalongan sejak tahun 2017 sesuai dengan Nomor 02 Tahun 2013 tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan dan berkembang dengan adanya direktur pada tahun 2019. Program BUMDes juga mempunyai target khusus dalam memberdayakan masyarakat desa melalui BUMDes KMJ

Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur dengan berbagai jenis unit usaha. Rutinitas yang dilakukan pengurus dan pemerintah desa dalam menjalankan program BUMDes KMJ Desa Kalongan ternyata mampu membawa perubahan dalam segi perekonomian dan sosial.

Pendirian dan pengelolaan BUMDes yang dimana sesuai dengan aturan yang mengakomodir tentang potensi sehingga aturan BUMDes memberikan ruang untuk berusaha dan berbisnis. Selanjutnya tujuan implemetasian program BUMDes KMJ Desa Kalongan yaitu, untuk mencari pendapatan asli desa yang dapat digunakan sebagai menambah pembangunan melalui APBDes dan tujuan dalam sisi pemberdayaan masyarakat yaitu untuk membuka lapangan pekerjaan, membantu distribusi produk masyarakat, sehingga nantinya dalam pemberdayaan masyarakat ada perputaran perekonomian.

Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan dapat membantu desa dan masyarakat dalam segi perekonomian. Pengelolaan program memberikan hasil dalam pemanfaatan potensi lokal yang dimana Desa Kalongan sudah menjadi desa sadar wisata. Menurut teori Delivery (2004) menyatakan bahwa melakukan pemberdayaan masyarakat sangat penting karena mempunyai tujuan untuk perbaikan usaha dengan keberadaan program dapat membantu masyarakat dalam segi sosial atau ekonomi dan memberikan manfaat secara besar (Mardikanto, 2017: 112).

2. Sumber Daya

Sumber daya dalam kehidupan menjadikan sebuah hal yang sangat penting dalam program BUMDes. Implementasi program perlu dukungan sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Program BUMDes KMJ Desa Kalongan perlu dukungan dari sumber daya manusia untuk menjalankan program sampai mendapatkan hasil yang berkualitas. Selain sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program diperlukannya sumber daya finansial untuk mendorong keberhasilan unit usaha BUMDes. Proses dalam menjalankan program BUMDes KMJ Desa

Kalangan, yang menjadikan faktor pendukung pertama ialah sumber daya manusia.

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan program BUMDes dengan menjalankan program yang mejadi tanggung jawab ketua unit. Kegiatan dalam program tersebut sangat bermanfaat karena mereka selain dalam pengelolaan mereka juga pemasaran program kepada masyarakatnya agar masyarakat Desa Kalongan mengetahui pentingnya dalam menjaga lingkungan dan pemanfaatan potensi lokal. Banyak masyarakat yang bergabung dalam program BUMDes KMJ Desa Kalongan. Sumber daya finansial yang di dapat dari setiap unit nya mendapatkan nominal yang berbeda-beda. Pendapatan dari program BUMes dalam pemanfaatan hasil salah satunya untuk mengembangkan unit usaha yang ada. Pemberdayaan masyarakat sumber daya berupaya membantu perekonomian masyarakat dengan membuka lapangan pekerjaan, membantu masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, dan berbudi luhur dengan membantu masyarakat kekurangan dengan memberikan bantuan kepadanya.

Pengimplementasian Sumber daya dalam pengelolaan program mempunyai ketua unit tersendiri, sehingga dalam pemberdayaan masyarakat dari setiap unit menggunakan metode yang berbeda. Menurut teori pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan sumber daya sangat penting menggunakan metode Sekolah lapangan yang diperlukannya evaluasi hambatan dari setiap sumber daya guna memecahkan permasalahan agar berjalan secara efektif (Mardikanto, 2017: 204).

3. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Kebijakan program BUMDes KMJ Desa Kalongan merupakan anjuran dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dari awal mula pembentukan. Komunikasi juga dapat disebut koordinasi di instansi yang dijalankan sesuai mekanisme yang baik untuk di implementasikan. Sehingga semakin baik koordinasi komunikasi antara pihak pelaksana

yang terlibat maka dalam asumsi kesalahan-kesalahan sangat kecil untuk terjadi. Melaksanakan pertemuan yang dilakukan sebulan sekali dengan tujuan untuk membahas permasalahan dan peningkatan yang lebih baik. Koordinasi yang dilakukan pemerintah desa kepada pengurus BUMDes KMJ Desa Kalongan juga sudah begitu baik karena dilakukan sesuai dengan apa yang dibutuhkan baik itu komunikasi dengan pemerintah daerah ataupun dengan lembaga-lembaga desa.

Tahapan dalam pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan rencana kegiatan perlu adanya pendampingan dari pihak yang terkait agar dalam pengimplementasian program sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal (Mardikanto, 2017: 125). Aktivitas dari setiap pelaksana unit usaha berbeda-beda, pelaksanaan komunikasi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tanpa harus pas jam kerja dan ruang kerja. Pelaksanaan komunikasi dapat dilakukan untuk membangun kekurangan antar unit BUMDes, sehingga dari pekerja dan pengelola tidak terlalu formal dalam implementasi, program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat dengan adanya kegiatan pendampingan antar lembaga dalam pelaksanaan program. Pencapaian tujuan sejak awal dapat berjalan sesuai dengan adanya komunikasi kepada bagan-bagan yang terkait, sehingga semakin sering melaksanakan komunikasi akan semakin berjalan lebih baik.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam menjalankan program BUMDes menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dalam implementasi program. Pelaksana dalam program BUMDes meliputi organisasi formal dan informal dalam mengimplementasikan program. Perwujudan implementasi program BUMDes KMJ Desa Kalongan menjadikan sebuah hal penting dalam menjalankan program, oleh karena itu dibutuhkan dukungan dan bentuk kerjasama para agen pelaksana dalam mewujudkan implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat.

Implementasikan program BUMDes KMJ Desa Kalongan haruslah sinkron yang dijalankan. Pelaksanaan program BUMDes KMJ Desa

Kalongan namun ada kendala yang dilewati merubah pola pikir masyarakat. Pelaksanaan program BUMDes KMJ Desa Kalongan sesuai pada bab 3 dalam pemberdayaan masyarakat menggunakan konsep tahapan melalui sosialisasi lebih luas terkait BUMDes agar meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kemanfaatan potensi. Agen pelaksanaan program BUMDes membantu masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kesehariannya dengan baik karena dari BUMDes sudah banyak menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan.

Pelaksana cukup memadai secara moral dan materi yang diberikan oleh agen pelaksana. Bentuk kerjasama yang didapatkan juga sudah cukup bagus karena para agen pelaksana selalu membumihkan dalam segi fasilitas dan prasarana yang ada pada BUMDes. Akan tetapi dalam pengelolaan program BUMDes dari segi tempat belum ada jadi masih ngikut di Kantor Desa Kalongan sehingga belum ada ruang khusus untuk BUMDes KMJ Desa Kalongan.

5. Sikap dan Kecenderungan Agen Pelaksana

Implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat disesuaikan dengan sikap penerima dan penolak dari agen pelaksana. Program dapat terjadi kegagalan dalam suatu implementasi sering diakibatkan ketidaktaatan terhadap tujuan dan ukuran dasar yang ada dalam Peraturan Desa No 02 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Desa Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan. Pelaksana program dijadikan sebuah hal yang penting karena sikap yang dimiliki akan mempunyai perbedaan antara satu dengan yang lain.

Penguatan kelembagaan dengan membentuk BUMDes yang sesuai dengan mekanisme. Pelaksanaan program yang sudah berjalan kisaran 5 Tahun yang dimana dapat membantu masyarakat dalam segi sosial dan perekonomian. Meskipun aturan dalam pelaksanaan program BUMDes sudah realis, akan tetapi sayang sekali dengan adanya pemanfaatan potensi lokal ini belum seluruh warga Desa Kalongan ikut andil dalam pemanfaatan potensi, sehingga pemerintah desa dan pihak yang berkait

dalam BUMDes KMJ Desa Kalongan dapat memberikan pendampingan dan sosialisasi secara luas agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan secara baik.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial

Implementasi program dalam menjalankan lembaga BUMDes tidak akan lepas dari lingkungan eksternal berupa lingkungan sosial, ekonomi, dan politik dalam kegiatan masyarakat. Kondisi tersebut sangat berperan dan berpengaruh besar dalam keberhasilan program BUMDes karena untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, apabila kondisi sosial dan ekonomi kurang kondusif dapat menjadikan sumber permasalahan dan kegagalan dalam kinerja implementasi program.

Badan Usaha Milik Desa KMJ Desa Kalongan dapat membantu masyarakat. Pelaksanaan program dari setiap unit usaha membuka lapangan pekerjaan agar masyarakat terlibat di setiap unit BUMDes KMJ Desa Kalongan. Selain itu BUMDes juga membantu masyarakat dalam pengurangan volume persampahan yang ada di lingkungan Desa Kalongan, agar dapat berantusias dalam menjaga lingkungannya bersih dan hidup sehat.

Pelaksanaan program BUMDes KMJ Desa Kalongan tidak lepas dari pemerintah baik pemerintah daerah maupun desa dan instansi-instansi juga membantu berjalannya unit program BUMDes. Lingkungan sosial dalam program BUMDes KMJ Desa Kalongan juga mendukung jalannya program BUMDes KMJ Desa Kalongan, dengan memberikan bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya agar lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat akan mendukung jika hal tersebut memberikan dampak baik untuk desa dan warga Desa Kalongan. Lingkungan dalam hal sosial sudah membantu masyarakat dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan sehat, akan tetapi dalam melakukan perubahan mindset masyarakat yang masih terkendala bagi pelaksana program. Segi perekonomian masyarakat

bergabung dalam BUMDes KMJ Desa Kalongan juga dapat membantu perekonomian di setiap bulannya.

Pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan program BUMDes dari segi sosial, ekonomi, dan politik mempunyai prinsip dalam melakukan perubahan untuk masyarakat desa. Pelaksanaan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya, begitu juga diperlukannya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program agar dapat tercapai tujuan yang sudah direalisasikan (Tesoriero, 2008: 385). Prinsip yang mendasari dalam pengelolaan program yang tidak lepas dari pendampingan pihak terkait yaitu pemerintah desa, BPD, lembaga terkait dan masyarakat. Pelaksananya diantaranta dengan adanya partisipasi dari semua komponen yang terkait untuk bersukarela dan memberikan dukungan dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan yang sudah di tetapkan (Ridlwan, 2015: 434).

B. Analisis Hasil Implementasi Program BUMDes Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur

Pemberdayaan masyarakat Desa Kalongan yang dilakukan dengan harapan dapat mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaan program, dengan kondisi masyarakat Desa Kalongan pada awalnya kurangnya memanfaatkan potensi, kurangnya menjaga dalam hidup sehat dan bersih. Selanjutnya dengan permasalahan tersebut harapannya dapat menyelesaikan masalah menggunakan metode agar sebuah pengembangan dalam memberdayakan masyarakat yang mendapatkan hasil yang maksimal.

Menurut KBBI Implementasi berasal dari kata *Implementor* yang berarti penerapan dan pelaksanaan (Kemendikbud RI, 2020). Secara istilah bahwa implementasi adalah sebuah kegiatan yang dilakukan secara individu atau kelompok yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan guna mencapai tujuan dalam kebijakan.

Konsep pemberdayaan masyarakat dalam tahapan untuk mencapai sebuah tujuan program yaitu dapat melakukan proses pemberdayaan

masyarakat dengan mengidentifikasi dan mengkaji potensi desa dalam pemanfaatan sumber daya. Pelaksanaan tahapan tersebut dapat dilakukan untuk mencapai tujuan agar masyarakat dapat mengidentifikasi program yang sedang dilakukan pada BUMDes (Mardikanto, 2017: 125).

Indikator program dalam pemberdayaan masyarakat untuk mengukur keberhasilan program menurut Sumodiningrat dalam segi sosial dan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diukur keberhasilannya dengan melihat indikator dalam berkembangnya program yang dijalankan untuk membantu meningkatkan kepedulian masyarakat dan meningkatkan pendapatan warga dalam pemenuhan kebutuhan pokok dan sosial (Sumodiningrat, 1997: 134).

Program BUMDes KMJ Desa Kalongan dalam pengembangan dengan kerekatan sosial yang dilakukan secara kelompok pengurus BUMDes KMJ Desa Kalongan dan pemerintah Desa Kalongan serta dukungan dari masyarakat Desa Kalongan, sehingga menjadikan sebuah perubahan bagi masyarakat dalam segi sosial maupun segi perekonomian yang membantu taraf kehidupan masyarakat Desa Kalongan. Diantaranya:

1. Aspek Sosial

Implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat tentunya mengharapkan hasil yang sesuai dengan tujuan. Keberhasilan implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat terbagi menjadi salah satunya dalam aspek sosial. Sebelum adanya program pengambilan sampah lingkungan Desa Kalongan terlihat kurangnya dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Secara tidak langsung masyarakat Desa Kalongan kurang dalam pemanfaatan potensi lokal. Berdasarkan hasil pemasaran bagan Unit usaha persampahan, sehingga warga mulai mengikuti program pengambilan sampah, dengan tujuan untuk menjaga lingkungan agar tidak kumuh dan menjaga kesehatan. Hingga warga mulai sadar untuk tetap menjaga kebersihan dan hidup sehat karena untuk hidup sehat.

Pemberdayaan masyarakat dalam mengimplementasikan program BUMDes KMJ Desa Kalongan dapat melaksanakan secara baik. Dengan ini dalam kepedulian sosial kepada masyarakat miskin menjadikan hasil yang nyata dalam menjalankan program BUMDes, sehingga masyarakat yang sudah berantusias gabung dalam pelaksanaan program sama dengan bersedekah membantu masyarakat miskin, karena sebagian persen hasil dari BUMDes akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan bantuan berupa sembako ataupun finansial. Pengambilan sembako itulah nantinya ke warung yang sudah bekerja sama dengan BUMDes dan hasil sembako itu juga dari pengelolaan BUMDes di unit usaha sembako. Dengan hal tersebut kemampuan masyarakat agar dapat memanfaatkan potensi lokal, sehingga dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat itu untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara signifikan.

Masyarakat Desa Kalongan dengan keberadaan BUMDes KMJ Desa Kalongan dapat dikatakan cukup baik dalam segi sosial karena banyak warga yang mendukung dengan adanya BUMDes, seperti ikut memanfaatkan fasilitas pembayaran Online, pelaksanaan gotong royong perbaikan wisata, menjaga lingkungan agar lebih bersih dan sebagainya, dapat dilihat dalam kepedulian lingkungan dan masyarakat yang membutuhkan bantuan sangat signifikan mengenai stratifikasi kerja. Setelah adanya program BUMDes KMJ desa Kalongan diharapkan menjadi lebih baik untuk kedepannya dan harapan pemerintah desa dapat memberikan dukungan lebih agar dapat merubah mindset masyarakat yang belum antusias bergabung dengan adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan. Hal tersebut menjadikan tantangan dalam mencapai perubahan lingkungan menjadi bersih dan sehat. Berawal dari disinilah pemerintah desa bergerak dalam pengelolaan sampah pada program unit pengambilan sampah.

Indikator keberhasilan program dalam pemberdayaan masyarakat digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberdayaan masyarakat telah mampu meningkatkan kepedulian masyarakat dalam

upaya merubah lingkungan agar tetap bersih, hidup saling membantu satu sama lain dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam segi sosial (Sumodiningrat, 1997: 134).

2. Aspek Perekonomian

Pelaksanaan program dalam pembuatan keputusan berhubungan dengan pengalokasian dengan pemanfaatan potensi sumber daya yang terbatas diantara berbagai keanggotaanya dengan mempertimbangkan kemampuan (Damsari, 2016:130). Implementasi program dalam pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah program pemerintah daerah yang ditugaskan untuk pemerintah desa dalam pembentukan BUMDes KMJ Desa Kalongan, keberadaan BUMDes KMJ Desa Kalongan sehingga membantu perekonomian masyarakat. Sebelum adanya program BUMDes KMJ Desa Kalongan masyarakat Desa Kalongan kegiatan dan pendapatan belum ada pengelolaan terkait dengan aset yang dimiliki desa dan potensi yang ada di desa. Masyarakat Desa Kalongan yang awalnya hanya mengembangkan produksi secara mandiri, oleh karena itu pemerintah desa berfikir inovasi untuk memmbantu masyarakat dalam segi perekonomian.

Keberadaan BUMDes KMJ Desa Kalongan dalam pemberdayaan masyarakat menjadikan peluang bagi masyarakat Desa Kalongan, dengan membuka lapangan pekerjaan. Segi perekonomian memberikan pendapatan untuk masyarakat Desa Kalongan dengan adanya BUMDes. Selain itu juga meningkatkan pendapatan desa yang nanti hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan desa dan mengembangkan program BUMDes KMJ Desa Kalongan. Pemanfaatan hasil untuk desa dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur Desa Kalongan dan mengembangkan potensi desa. Perkembangan BUMDes KMJ Desa Kalongan juga memberikan motivasi kepada desa-desa lain untuk dalam pemanfaatan sumber alam dan potensi lokal.

Indicator keberhasilan program dalam pemberdayaan masyarakat terlihat dari peningkatankan dalam kemampuan finansial yang dapat membantu pendapatan masyarakat dengan berkurangnya angka

kemiskinan (Sumodiningrat, 1997: 134). Berdasarkan hal tersebut bahwasanya pelaksanaan BUMDes KMJ Desa Kalongan telah memberikan manfaat dan memberikan pendapatan untuk masyarakat Desa Kalongan. Keberhasilan dalam sebuah program juga digunakan untuk peningkatan potensi desa dan mengembangkan program BUMDes KMJ Desa Kalongan. Program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat sesuai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2013 tentang BUMDes yang didalamnya membahas tata kelola dan aturan pelaksanaan program. Pelaksanaan program dengan tujuan dan ukuran sudah jelas yang digunakan untuk pemanfaatan potensi. Sumberdaya pelaksanaan program dalam pemanfaatan dan kebutuhan yang dicapai, karakteristik agen pelaksana sudah realis untuk faktor kendala dalam pelaksanaan program sosialisasi kurang meluas, sikap kecenderungan dalam agen pelaksana sudah mendapatkan dukungan dari lembaga, komunikasi antar organisasi sudah terstruktur dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan dari lingkungan sosial, ekonomi dan politik dapat memberdayakan masyarakat dengan cara memanfaatkan potensi. Pelaksanaan program dalam pemberdayaan masyarakat dapat memperbaiki tindakan dengan beragam melalui sumber daya dan mendorong masyarakat untuk bergabung dalam pelaksanaan program agar mencapai tujuan yang ada sejak awal pendirian program.
2. Hasil Implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang yaitu meningkatkan taraf kehidupan sector perekonomian masyarakat dan desa dengan memanfaatkan sumber daya dengan memanfaatkan potensi desa sehingga dapat memberdayakan masyarakat dengan mengembangkan dirinya menjadi lebih mandiri dan kreatif. Dari segi sosial masyarakat Desa Kalongan erat hubungannya dengan adanya program BUMDes

melalui menjaga lingkungan dari sampah sehingga ada perubahan dengan adanya program BUMDes KMJ Desa Kalongan.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur sudah memiliki hasil yang cukup baik, tetapi peneliti telah memberikan saran secara objektif sesuai dengan objek penelitian, yaitu:

1. Agar dapat melakukan penyegaran pengurus dengan melakukan pembagian pengurus yang sesuai dengan kemampuan dibidangnya dan melakukan penambahan staff pembantu agar pekerjaan tidak terbengkelai dan dalam pemanfaatan potensi agar dapat berjalan dengan baik.
2. Program BUMDes KMJ Desa Kalongan juga diperlukannya pelatihan yang maksimal bagi pelaksana BUMDes KMJ Desa Kalongan, agar dapat dikembangkan ke masyarakat.
3. Memperkuat dan meningkatkan komunikasi antar pengurus dan pemerintah desa dengan lembaga yang berkait agar program yang dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan sejak awal.
4. Meningkatkan pengelolaan dengan menggunakan manajemen yang baik agar tersimpan rapi dalam dokumen.
5. Setelah adanya program BUMDes KMJ desa Kalongan diharapkan menjadi lebih baik untuk kedepanya dalam menjalankan program, harapannya dapat memberikan dukungan lebih agar dapat merubah mindset masyarakat yang belum antusias bergabung dengan adanya BUMDes KMJ Desa Kalongan, dapat dilakukan dengan sosialisasi agar masyarakat mengetahui program yang dijalankan oleh BUMDes.
6. Meningkatkan pengelolaan program BUMDes dari segi tempat belum ada jadi masih ngikut di Kantor Desa Kalongan, dengan hal tersebut dapat di buatkan tempat khusus BUMDes KMJ Desa Kalongan jadi apabila ada kunjungan dari antar lembaga desa ada sudah ada ruang khusus.

7. Masyarakat diharapkan mempunyai keterbukaan dengan adanya program BUMDes KMJ Desa Kalongan.
8. Harapannya masyarakat dapat memberikan motivasi kepada masyarakat lain untuk dapat berpartisipasi dengan adanya program BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community and Development: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian*. Yogyakarta: Rineka Cipta.
- Aryanto, Ferry, P & Nugroho, S. 2018. Implementasi Program Desa Wisata alam Rangka Pemberdayaan Masyarakat (Studi Desa Mas Kecamatan Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali). *Jurnal Destinasi Pariwisata*. Vol. 5 (2).
- Damsari & Indrayani. 2016. *Pengantar Sosiologi Pedesaan*. Jakarta: Kencana.
- Fakih, A. *Sosiologi Dakwah Perkotaan: Perspektif teoritik dan Studi Kasus*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Hamid, N. 2020. Urgensi Pendidikan Kebencanaan Kepada Masyarakat. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 232–239.
- Ife, J, & Tesoriero, F. 2008. *Community development: Alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malik, Hatta Abdul. 2013. *Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Quran (Tpq) Alhusna Pasadena Semarang. Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 13(2), 387–404.
- Mardikanto, T. & Soebiato, P. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Bandung*: Alfabeta.
- Mudhofi. 2014. Pengembangan Masyarakat Desa Terpadu Berbasis Potensi Lokal di Jamban Kalibeber Mojotengah Wonosobo. Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- Pasolong, H. 2017. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabetha.
- Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridlwan, Z. 2015. Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pembangun Perekonomian Desa. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8 (3). 314
- Riyadi. A. *Pengembangan Masyarakat Upaya Dakwah dalam Membangun Kemandirian Masyarakat*. Semarang: Fatawa Publishing.
- Rosmedi, dan Ristanti, R. 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Sumedang: Alqaprint Jatinegoro.
- Sabatier, P. A. 1986. Top-Down and Bottom-Up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6(1), 21–48.
- Sari, I. P & Ekaputri, R. A. (2020). BUMDes Di Kecamatan Kabawetan : Kajian Manfaat Bagi Masyarakat. *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 55–69.

- Sarwono, J. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soetomo. 2008. *Masalah Sosial Dan Upaya Pemecahannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2018. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat, G & Wulandari, A. 2016. *Membangun Indonesia Dari Desa Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sumodiningrat, G. 1997. *Pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat: kumpulan esei tentang penanggulangan kemiskinan*. Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Supena, I. 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pengelolaan Limbah Industri Tekstil di Desa Brumbung Mranggen Demak*. Semarang: UIN Walisongo Semarang.
- Suryadi, A. Rusli, B. & Alexandri, M. B. 2021. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung. *Jurnal Responsive*, 4(1), 29–46.
- Susilowati, D. 2022. *Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif Ekonomi Islam (Studi do Desa Isorejo BUMDes Sinar Harapan)*. UIN Raden Intan Lampung.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. 1st ed. Alfabeta.
- Usman, S. 1998. *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. 2012. *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus: Edisi dan Revisi Terbaru*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yusuf. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif & Gabungan* Jakarta: Kencana.
- Zubaedi. (2013). *Pengembangan masyarakat wacana dan praktik*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan
Perubahan.

LAMPIRAN

Lampiran I

a. Wawancara Kepala Desa

- 1) Bagaimana proses implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat?
- 2) Apa tujuan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
- 3) Bagaimana sumber daya dalam menjalankan BUMDes?
- 4) Bagaimana aturan yang mendasari BUMDes?
- 5) Bagaimana cara melakukan sosialisasi dalam menggali program?
- 6) Apa kendala yang dialami selama proses BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat?
- 7) Bagaimana partisipasi stakeholder / masyarakat dalam program BUMDes?
- 8) Apa hasil program BUMDes secara perekonomian dan sosial dalam pemberdayaan masyarakat?
- 9) Bagaimana pendampingan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat?
- 10) Bagaimana tahapan Pemberdayaan masyarakat dengan program BUMDes?

b. Wawancara Direktur BUMDes

1. Bagaimana proses implementasi program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat?
2. Apa tujuan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
3. Bagaimana Tolak ukur keberhasilan BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
4. Bagaimana pengelolaan program kerja BUMDes?
5. Bagaimana sumber daya dalam menjalankan BUMDes?
6. Bagaimana aturan tugas pokok harian program BUMDes?
7. Bagaimana cara melakukan sosialisasi dalam menggali program?
8. Apa kendala yang dialami selama proses BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat?

9. Bagaimana hasil program BUMDes dalam memberdayakan masyarakat?
 10. Bagaimana partisipasi stakeholder / masyarakat dalam program BUMDes?
 11. Bagaimana pendampingan program BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat?
 12. Apa hasil program BUMDes secara perekonomian dan sosial dalam pemberdayaan masyarakat?
- c. Wawancara Masyarakat
1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui program BUMDes?
 2. Apa tujuan Bapak/Ibu bergabung dalam program BUMDes?
 3. Bagaimana perubahan masyarakat dengan adanya program BUMDes?
 4. Apa bentuk keterlibatan aktif masyarakat pada program BUMDes?
 5. Apa masyarakat terbantu dengan adanya program BUMDes?
 6. Apakah dengan adanya BUMDes KMJ sudah memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa dalam bidang sosial dan kesehatan?

Lampiran Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Yarmuji Selaku Kepala Desa Kalongan



Wawancara dengan Bapak Abu Selaku Sekretaris Desa Kalongan.



Wawancara dengan Bapak Afifudin Selaku Sekretaris BUMDes KMJ Desa Kalongan.



Dokumentasi Kerjasama dengan DLH Kabupaten Semarang.



Wawancara dengan Bapak Suhaji selaku K.U Pariwisata BUMDes KMJ Desa Kalongan



Wawancara Dengan Ketua Unit Persampahan BUMDes KMJ Desa Kalongan



Wawancara Dengan Anggota Persampahan BUMDes KMJ Desa Kalongan



Wawancara Dengan Karyawan Pariwisata BUMDes KMJ Desa Kalongan.



Wawancara Dengan Karyawan Persampahan BUMDes KMJ Desa Kalongan



Wawancara dengan Karyawan unit pariwisata BUMDes KMJ Desa Kalongan.



Kunjungan siswa-siswi ke unit persampahan BUMDes KMJ Desa Kalongan



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
KECAMATAN UNGARAN TIMUR
DESA KALONGAN**

Gatotkaca No. 141, Telp: (024) 7691 1416 UNGARAN TIMUR 50551
Web. www.desakalongan.com email desakalongan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 100//D/ VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yarmuji
Jabatan : Kepala Desa Kalongan
Alamat : Kalongan, RT 004 RW 008 Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nur Aini Sarifah
NIM : 1801046016
Status : Mahasiswa S1-PMI Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan kegiatan observasi dan penelitian di BUMDes Kalongan Mandiri Jaya Desa Kalongan dalam rangka penyusunan skripsi, dengan judul “Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagai berikut mestinya. Atas perhatian kami ucapkan terimakasih.

Kalongan, 19 Juli 2022



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Aini Sarifah
NIM : 1801046016
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
TTL : Kabupaten Semarang, 03 April 2000
Alamat : Kalongan RT 001/ RW 008 Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang Prov Jawa Tengah.

Jenis Kelamin : Perempuan

No. Telepon : 085941385447

Email : ainisarifah456@gmail.com

Pendidikan Formal:

1. RA Diponegoro Mendiro
2. MI Diponegoro Mendiro
3. MTS AL Asror Patemon Gunung Pati
4. MA AL Asror Patemon Gunung Pati
5. UIN Walisongo Semarang, S1 Pengembangan Masyarakat Islam

Pendidikan Non Formal:

1. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal
2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut
3. Uji Sertifikasi di LPTP Karanganyar Solo
4. Masa Kesetiaan Anggota IPPNU Kecamatan Ungaran Timur